



**DINAS PERHUBUNGAN
KAB. POLEWALI MANDAR**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP**

**TAHUN
2022**

DISHUB
POLEWALI MANDAR



Kata Pengantar



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Hal tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan detail kinerja dan keuangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang terjabarkan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur tingkat pencapaian kinerja. Diharapkan, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja urusan Perhubungan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.



Polewali Mandar, Februari 2023
KEPALA DINAS

Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197403061993021001



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis Dinas Perhubungan tahun 2019-2024. Ringkasan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar yang dihasilkan tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

A. Sasaran : Meningkatnya kinerja transportasi dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas.

Tahun 2022, target 150 kejadian Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas), sementara Lakalantas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 208 kasus, sehingga capaian kinerja 76%. Berdasarkan itu, maka angka Lakalantas Tahun 2022 mengalami Peningkatan 69% dari 166 kejadian pada tahun 2021.

Dari sisi fatalitas kejadian juga terjadi penurunan. Tahun 2022 terdapat Jumlah peningkatan korban meninggal dunia dari 34 korban pada tahun 2021 naik menjadi 56 korban jiwa atau kenaikan sampai pada angka 64, 7%. Kenaikan ini akibat dari mobilitas orang dan barang yang semakin pada disamping itu adanya pengerjaan jalan Tran sulawesi

B. Indikator Program : Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik

Sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik, target kinerja 92,04% dan realisasi 89,67%, dalam artian capaian kinerja mencapai 66%.

Tahun 2022, tidak ada pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan masih pada angka 885 unit. Namun adan penambahan pada jumlah sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik 15 Warning Light dan 42 Penerangan malam umum .

- C. Indikator Program : Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman
- Pada Tahun 2022, Titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 71,43% dan realisasi 100%, dalam artian capaian kinerja mencapai 126%. Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik.
- D. Indikator Program : Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan.
- pada tahun 2022, angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 52.32% realisasi 100% capaian kinerja 156%.
- e. Indikator sasaran pada segmen manajemen perkantoran, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan : IKM dengan mutu pelayanan A (Baik), Predikat SAKIP BB dan Opini Keuangan WTP;
- f. Realisasi keuangan, PAGU anggaran sebesar Rp 4.681.591.224, realisasi Rp 4.589.003.444 atau terealisasi sebesar 98%.
- g. Terdapat 11 kegiatan pada 2 program: *pertama*, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Kegiatan Pertama Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kedua Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ketiga Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah keempat Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kedua Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pertama Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota kedua Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C ketiga Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir keempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kelima Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota keenam Audit dan

Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ketujuh Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan. Untuk itu, fokus dan melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap berbagai stakeholder dalam menekan dan mengantisipasi lonjakan fatalitas kecelakaan lalu lintas.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR CHART	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud	3
D. Tujuan	3
E. Sumber Daya Manusia	4
F. Issu Strategis	8
G. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Penetapan Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	14
A. Akuntabilitas Kinerja	14
B. Akuntabilitas Keuangan	74
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
LAMPIRAN	85

Daftar Tabel

II.1 Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator	11
II.2 Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja	12
II.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan	13
III.1 Capaian Kinerja	15
III.2 Realisasi dan Refokushing Anggaran Persentase Saprass	28
III.3 Titik Rawan Kecelakaan dan Kepadatan	34
III.4 Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas	37
III.5 Titik Lokasi Parkir Tertib	46
III.6 Realisasi dan Refokushing Anggaran Persentase Titik Rawan	47
III.7 Kendaraan Laik Jalan	53
III.8 Kendaraan uji KIR	54
III.9 Layanan Angkutan Darat	58
III.10 Angkutan dan Penumpang Keluar-Masuk Terminal	58
III.11 Realisasi dan Refokushing Anggaran Persentase Angkutan Keselamatan	61
III.12 Hasil IKM dan RTL	67
III.13 Target dan Realisasi PAD	75
III.14 LRA Tahun 2020	77
III.15 Total PAGU dan Refokushing	78

Daftar Chart

I.1	SDM Dinas Perhubungan	4
I.2	Jabatan Dinas Perhubungan	4
I.3	Kualifikasi Pendidikan	5
I.4	Kepangkatan Dinas Perhubungan	5
III.1	Lakalantas Tahun 2017-2021	17
III.2	Korban dan Kerugian Materiil Lakalantas	18
III.3	Fatalitas Kecelakaan	20
III.4	Fatalitas dari korban jiwa	21
III.5	Sapras Perhubungan dalam Kondisi Baik	24
III.6	Sapras dan Kelengkapan Perhubungan	25
III.7	Sapras dan Kelengkapan Perhubungan	26
III.8	Persentase Titik Rawan Kecelakaan Tertib Aman	32
III.9	Titik Rawan Kecelakaan Tertib Aman	33
III.10	Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas	36
III.11	Ketertiban Titik Lokasi Parkir	45
III.12	Angkutan Umum sesuai Standar Keselamatan	51
III.13	Persentase Kendaraan Uji KIR	52
III.14	Jumlah Kendaraan Uji KIR	54
III.15	Layanan Angkutan Darat Tahun	57
III.16	Nilai Konversi IKM	68



BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good governance*), dimana akan terlihat proses manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk maksud tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan per undang-undangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 80) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 29 Juli 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024;
9. Peraturan Bupati Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;

11. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.

C. Maksud

2. Sebagai salah satu bahan ukuran akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;
3. Sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

D. Tujuan

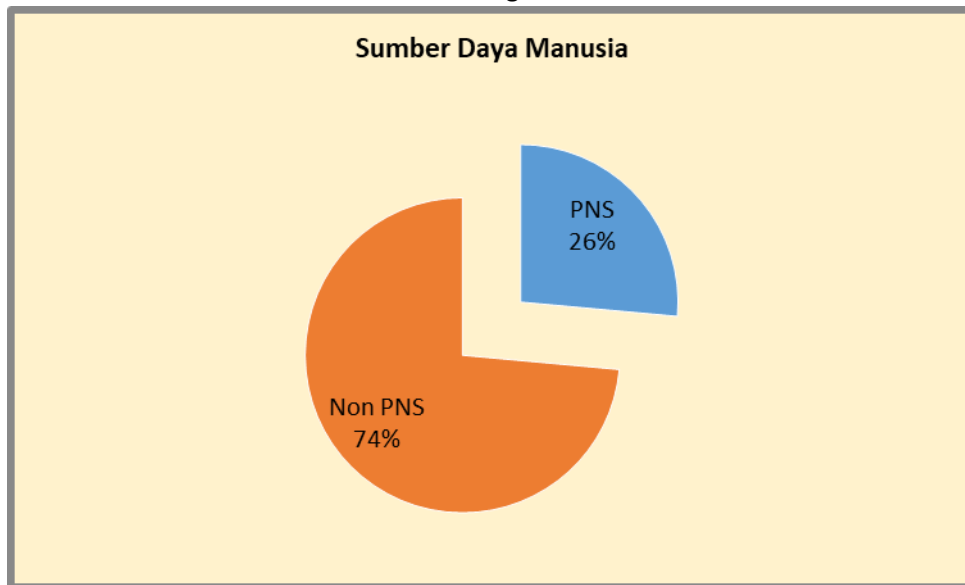
1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar;
5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

E. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan didukung sumber daya manusia sebanyak 33 (tiga puluh dua orang) dengan rincian 19 orang pejabat eselon dan 12 jabatan fungsional umum.

Chart I.1

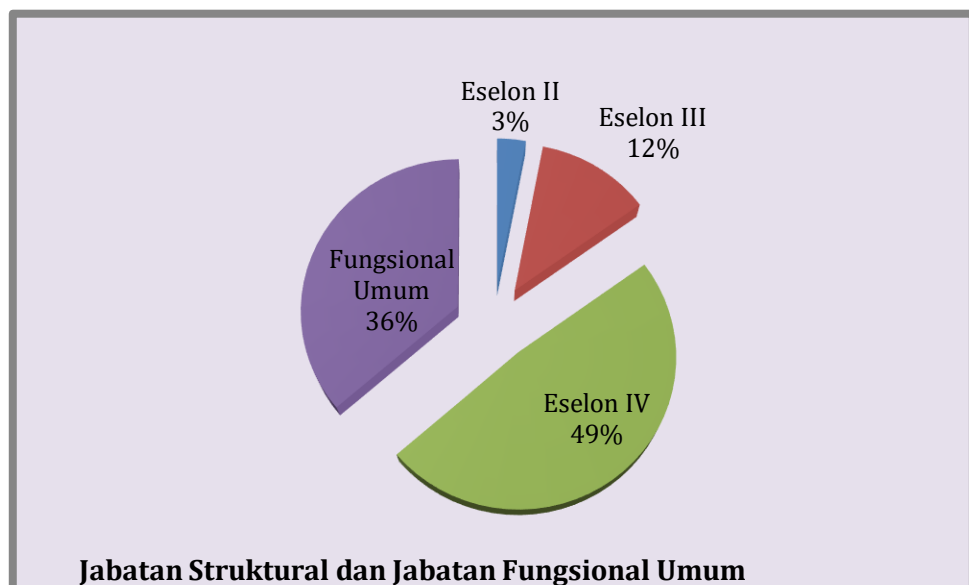
SDM Dinas Perhubungan Tahun 2022



Pejabat Struktural 21 orang dengan perincian: Eselon II : 1 orang, Eselon III : 4 orang, dan Eselon IV : 16 orang. Sementara Pejabat Fungsional : - orang, Fungsional umum : 12 orang, sedangkan Non-PNS : 90 orang.

Chart I.2

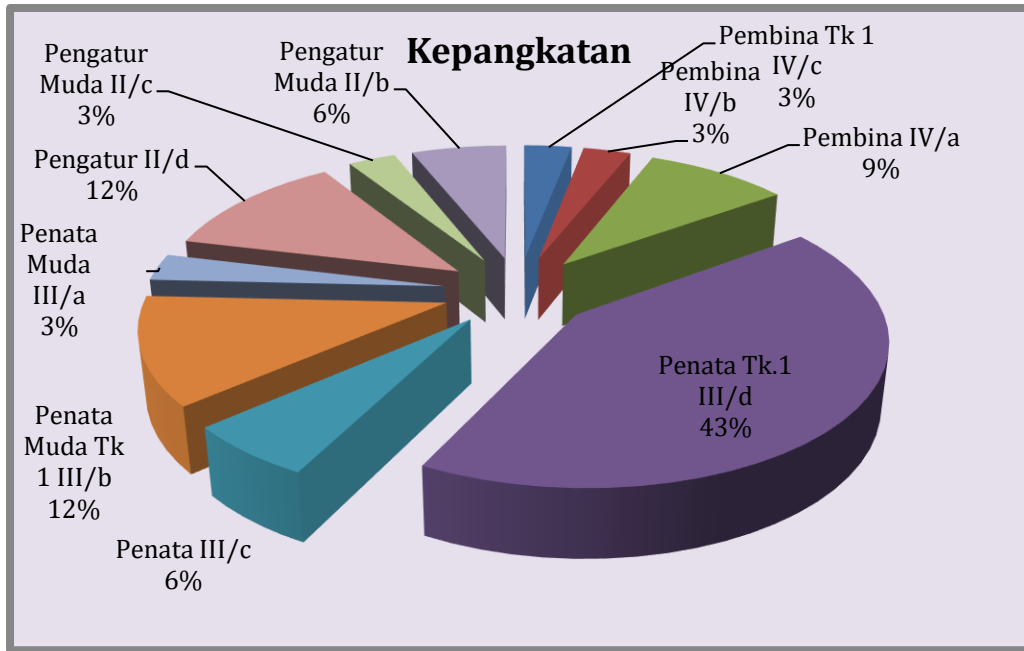
Jabatan Dinas Perhubungan Tahun 2022



Untuk kepangkatan, Golongan IV/c : 1 orang, IV/b : 1 orang, IV/a : 3 orang, III/d : 14 orang, III/c : 2 orang, III/b : 4 orang, III/a : 1 orang, II/d : 4 orang, II/c : 1 orang dan II/b : 2 orang

Chart I.3

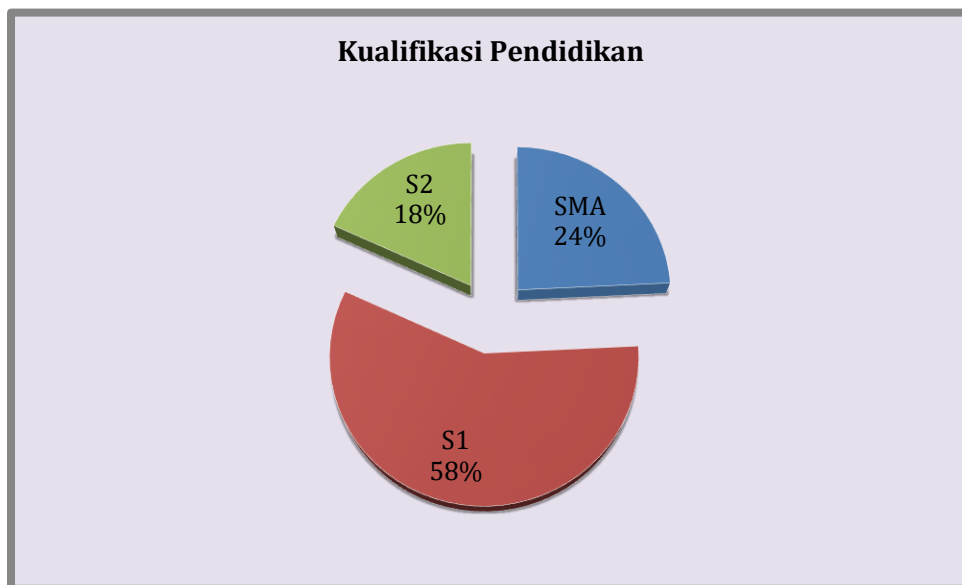
Kepangkatan Dinas Perhubungan Tahun 2022



Kualifikasi Pendidikan : S2 : 6 orang, S1 : 19 orang, D3 : 0 orang, SMA : 8 orang, SMP/SD : - orang.

Chart I.4

Kualifikasi Pendidikan Dinas Perhubungan Tahun 2022



Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Adapun susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

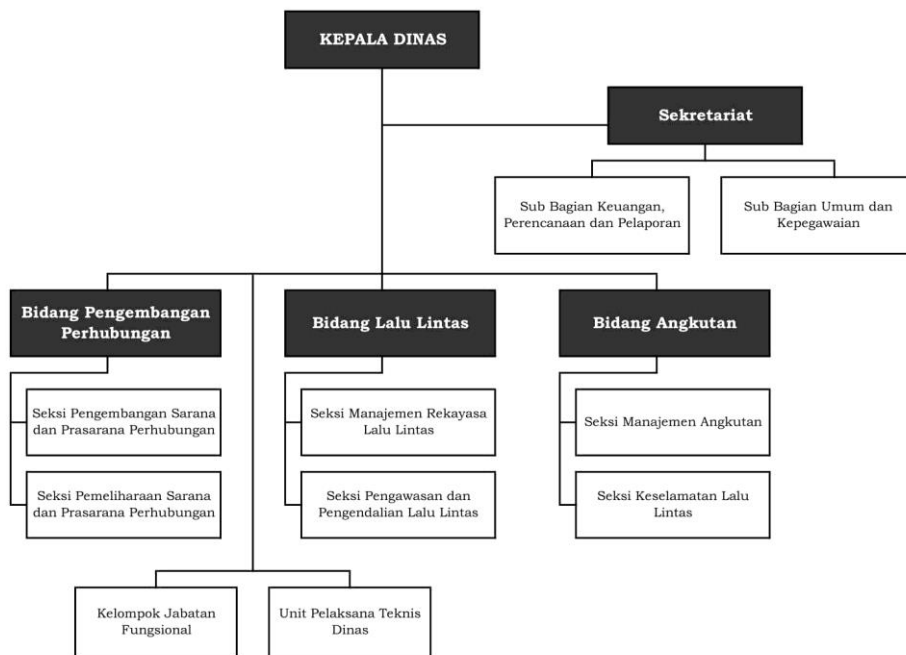
- 1) Kepala Dinas Perhubungan.
- 2) Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
- 3) Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan
- 4) Kepala Bidang Lalu Lintas
 - a. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas
- 5) Kepala Bidang Angkutan
 - a. Kepala Seksi Manajemen Angkutan
 - b. Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. UPTD Terminal
 - c. UPTD Perparkiran
 - d. UPTD Kepelabuhanan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan satuan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Januari 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MADAR

F. **Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional.

Rumusan isu strategis berikut berdasarkan rumusan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024, Berikut rumusan isu strategis terkait urusan perhubungan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024 :

1. Angka kecelakaan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas
2. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan dan konektivitas;
3. Rencana pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Polewali Mandar, akan menempatkan Polewali Mandar pada posisi strategis diantara daerah lain dan isu pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur;
4. Optimalisasi fungsi dan status Pelabuhan Tanjung Silopo;
5. Bekembangnya bisnis transportasi dan meningkatnya pemanfaatan kendaraan pribadi;
6. Standar keselamatan angkutan dan angkutan umum berplat Hitam
7. Penurunan minat pemanfaatan angkutan umum dan ketidakjelasan trayek angkutan umum
8. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya PJU (Penerangan Jalan Umum) dalam Mengurangi resiko angka kecelakaan;
9. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang.

Diantara rumusan strategis berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024, terdapat beberapa isu dominan selama tahun 2022 diantaranya :

1. Kecelakaan lalu lintas dan keselamatan berlalu lintas;
2. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan dan konektivitas;
3. Rencana pembangunan FS Bandara : kesiapan dokumen perencanaan;
4. Standar keselamatan angkutan terkait peran dan fungsi pengujian kendaraan bermotor;
5. Operasionalisasi angkutan umum dan Trayek
6. Pengelolaan Parkir dan pengesahan Parkir berlangganan

G. Sitematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang Perencanaan Strategis; dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Tahun 2022 merupakan tahun Keempat periode kepemimpinan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Meskipun begitu terdapat hal penting yakni pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2022 sudah melandai sehingga perencanaan kinerja urusan perhubungan dapat dilakukan dalam upaya menjaga konsistensi pada rencana strategis organisasi perangkat daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Strategik yang disusun oleh Instansi Pemerintah harus mencakup uraian tentang visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Tabel II.1
Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Tahun 2022

VISI			
POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA			
MISI			
1	2	3	4
Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah	Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern

MISI			
3			
Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan			
TUJUAN 1	TUJUAN 2		
Meningkatkan Kinerja Transportasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		
Sasaran Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Pada tabel berikut akan diurai secara spesifik tujuan, sasaran dan indikator urusan teknis perhubungan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 yang menjadi acuan dan ukuran kerja.

Tabel II.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi	Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Angka kecelakaan lalu lintas	233 kejadian	220 kejadian	200 kejadian	170 kejadian	150 kejadian	120 kejadian	100 kejadian
			Persentase kualitas sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	88.66%	88.81%	90.11%	91.19%	92.04%	96.55%	96.88%
			Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman	55.00%	58.33%	60.00%	61.67%	63.33%	65.00%	66.67%
			Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	44.88%	47.34%	49.01%	51.31%	52.32%	54.45%	55.78%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	C	B	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

B. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu janji kerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, mengacu kepada Rencana Strategis, alokasi anggaran dan kemampuan sumber daya lainnya.

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Dishub Tahun 2022

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
				2022
1	Meningkatkan Kinerja Sistem Transportasi Daerah	Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Angka kecelakaan lalu lintas	150 kejadian
			Persentase kualitas sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	92.04%
			Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman	71,43%
			Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	52.32%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP



BAB III

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021 mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 dan juga berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

Dari dokumen tersebut, terdapat dua (2) tujuan, empat (4) sasaran dengan empat (4) indikator. Sedangkan yang menjadi fokus dalam LAKIP Tahun 2022 berfokus pada sasaran meningkatnya kinerja transportasi daerah dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas.

Dari itu, terdapat tiga (3) indikator program yang menjadi fokus capaian laporan ini, pertama persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman dan persentase angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan. Dari masing-masing indikator terdapat korelasi dan berfokus pada tiga hal, pertama sarana prasarana perhubungan, kedua ketertiban dan keamanan lalu lintas pada titik rawan kecelakaan dan yang ketiga terkait standar keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

Dalam pemaparan ini akan dijabarkan secara komprehensif turunan dari indikator program sampai pada level indikator kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Analisis dan evaluasi juga dilakukan untuk menghitung target capaian dan realisasi setiap indikator kinerja dengan tentu mengungkap kendala dan solusi masing-masing.

Pengukuran Kinerja, Skala Predikat dan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menganalisis tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dari masing-masing indikator terkait. Rumus untuk menghitung capaian kinerja indikator terdapat dua macam :

1. Indikator bermakna positif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya, semakin kecil realisasi semakin buruk kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya kinerjanya, atau sebaliknya, semakin kecil realisasi semakin baik kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) / \text{Target} \times 100\%$$

Dalam laporan ini, indikator negatif digunakan untuk mengukur kinerja sasaran meningkatnya kinerja transportasi daerah dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95% s.d <100%	Sangat Berhasil
80% s.d 95%	Berhasil
50% s.d <80%	Cukup Berhasil
0% s.d <50%	Tidak Berhasil

Tabel III.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

No.	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah	Angka kecelakaan lalu lintas	102.00%	Sangat Berhasil
		Persentase kualitas sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik	99.76%	Sangat Berhasil
		Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman	102.19%	Sangat Berhasil
		Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan	124.22%	Sangat Berhasil
		Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	Baik	Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP



SASARAN 1

Meningkatnya Kinerja Transportasi Daerah

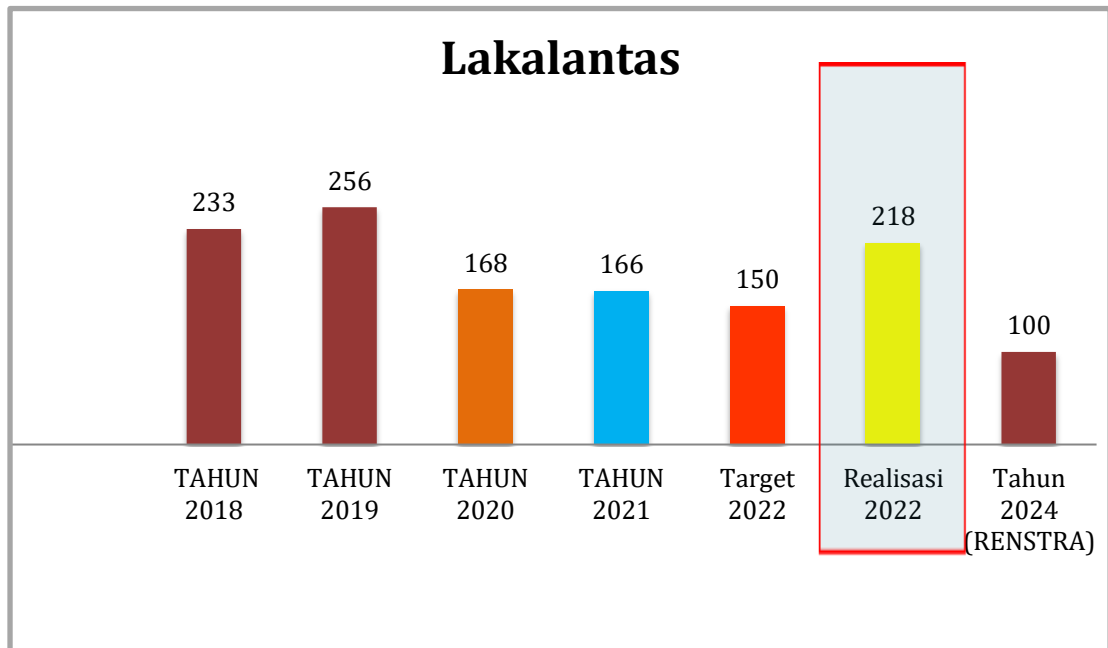
Indikator

Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Target

150 Kejadian

Chart III.1
Lakalantas Tahun 2018-2022 dan target akhir Renstra



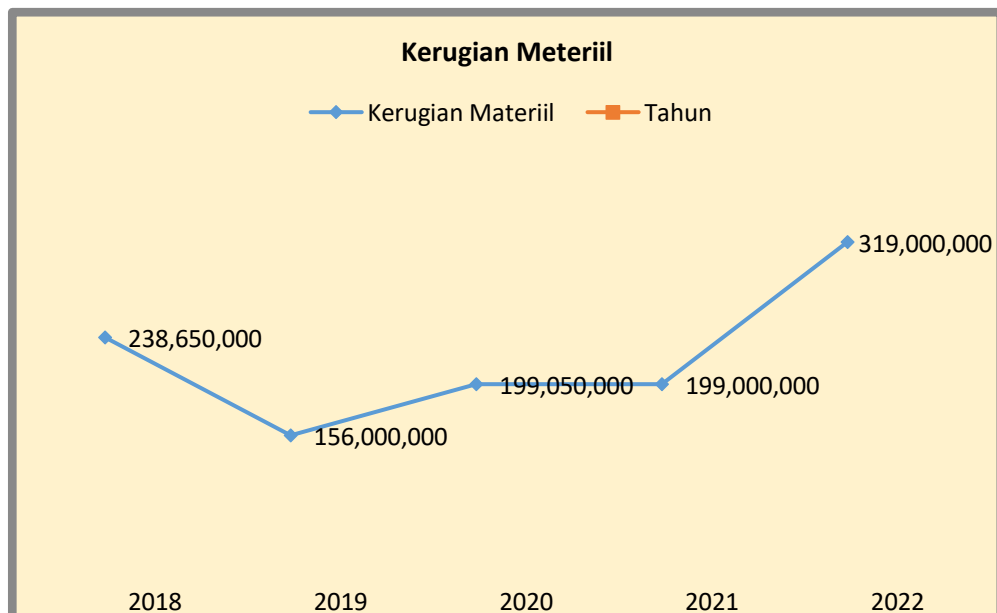
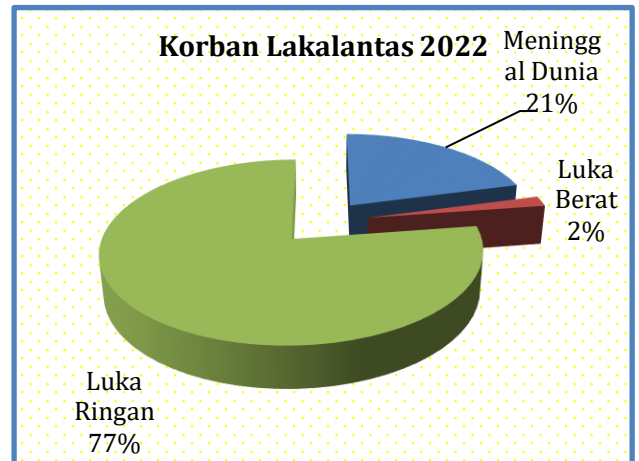
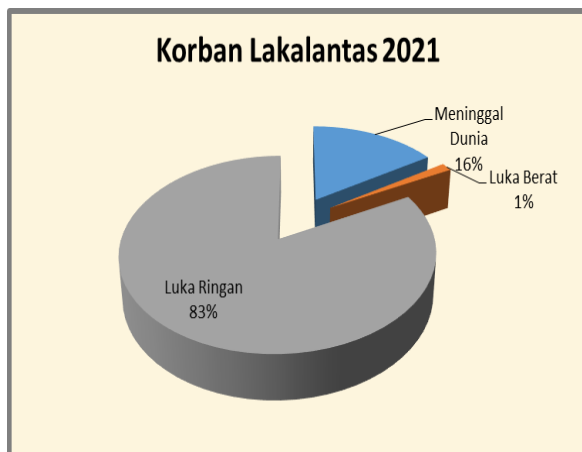
Dengan hitungan indikator negatif, capaian kinerja tahun 2022 untuk menekan angka Lakalantas yang mencapai 69%. Capaian kinerja dasar tahun 2018-2022 berangkat dari angka -2%. Kemudian, bila disandingkan dengan target akhir Renstra yakni 100 kejadian Lakalantas, maka kinerja tahun 2021 mencapai 46%. Berdasarkan chart tersebut juga tergambar, bahwa angka Lakalantas Tahun 2022 mengalami Peningkatan 31,32% kejadian dari tahun 2021.

Dari sisi target kinerja tidak terlampaui. Hal ini disebabkan selama tahun 2022 kondisi alam berupa banjir menyebabkan banyaknya jalan yang rusak. Meskipun, Lakalantas tetaplah merupakan kejadian insidental yang merugikan. Kelalaian manusia, kondisi jalan dan kendaraan merupakan faktor dominan Lakalantas. Namun, keberadaan fasilitas keselamatan jalan, rambu-rambu lalu lintas dan juga penerapan standar keselamatan jalan angkutan serta pengaturan pengamanan lalu lintas juga

dianantara upaya yang dilakukan dalam menekan laju Lakalantas di Kabupaten Polewali Mandar.

Chart III.2
Korban dan Kerugian Materiil Lakalantas Tahun 2019-2022

Sumber : Polres Polman



Lakalantas di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, mencapai 233 kejadian dengan 62 korban meninggal dunia, 11 orang luka berat dan 326 luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 238.650.000. Tahun 2019, sebanyak 256 kejadian dengan 60 korban meninggal dunia, 0 orang luka berat dan 275 luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 156.000.000.

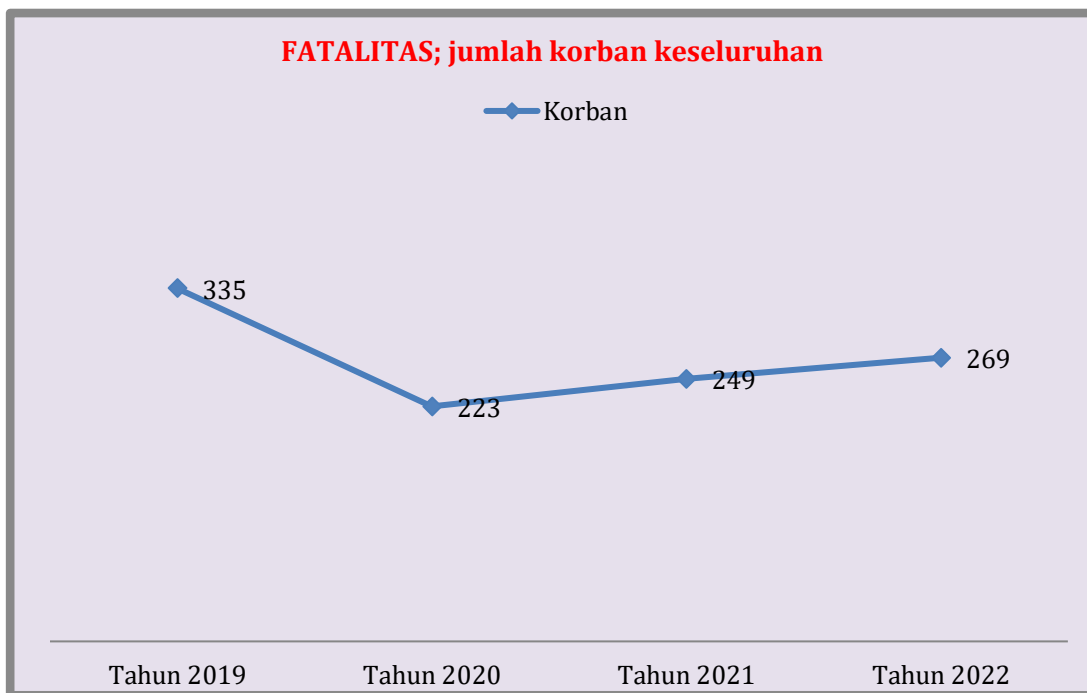
Sedangkan tahun 2020, jumlah kejadian mencapai 168 dengan 40 korban meninggal dunia dan 180 luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 195.050.000. Tahun 2021, Lakalantas 166 kejadian dengan 34 korban meninggal dunia, 3 luka berat dan 178 orang luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 170.600.000, dan pada tahun 2022 jumlah Lakalantas 218 kejadian dengan 56 korban meninggal dunia, 5 luka berat dan 208 orang luka ringan dengan kerugian materiil mencapai Rp. 319.000.000,

Dari data di atas bisa dicermati, jumlah korban dan kerugian materiil sangat fluktuatif, meskipun dari sisi kejadian tahun 2022 mengalami Peningkatan yang dari 166 kejadian pada tahun 2021 menjadi 218 kejadian pada tahun 2022 atau Peningkatan mencapai 32%. faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan disamping factor kondisi alam berupa curah hujan tinggi sehingga menyebabkan jalan yang licin dan sebagian jalan rusak juga, faktor kurangnya banyaknya (PJU) penerangan jalan umum yang mati dan rambu rambu serta banyaknya mobilitas kendaraan yang berimplikasi pada peningkatan Lakalantas pada tahun 2022.

Hal ini juga terjadi dari sisi fatalitas kejadian juga terjadi peningkatan. Tahun 2021 dan 2022 terdapat peningkatan jumlah korban meninggal dunia ataupun luka berat, dari 249 korban pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 249 korban jiwa atau Peningkatan sampai pada angka 8,03%. Dari tingkat fatalitas korban, dari sisi korban meninggal dan luka berat, pada tahun 2022 terjadi Penurunan 16% dari tahun 2021

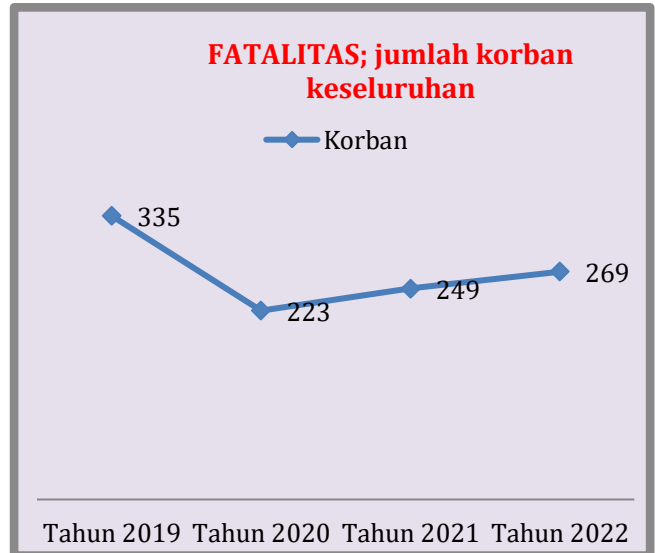
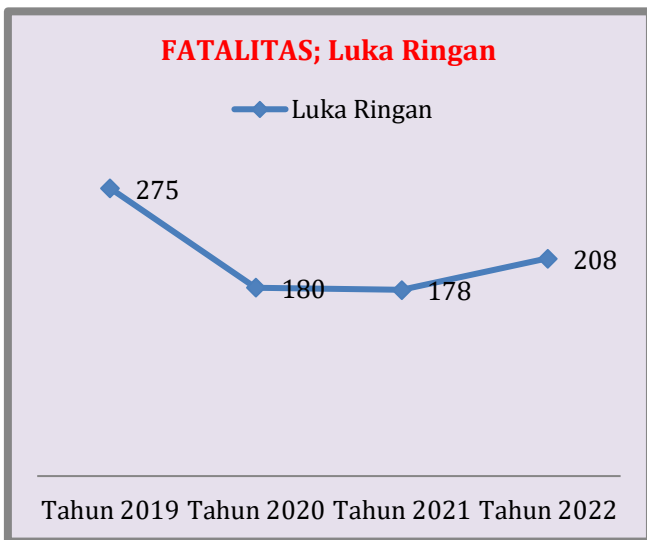
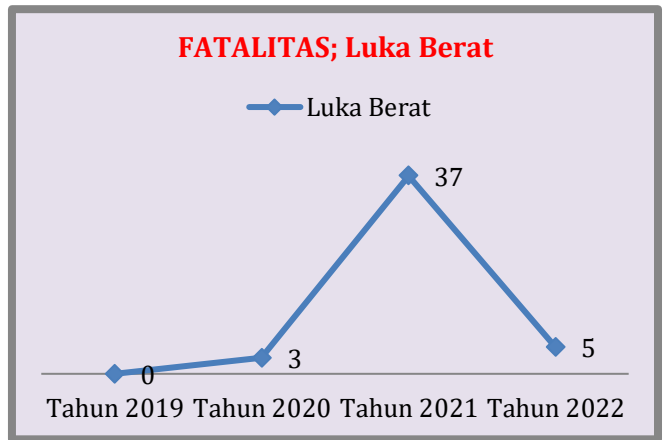
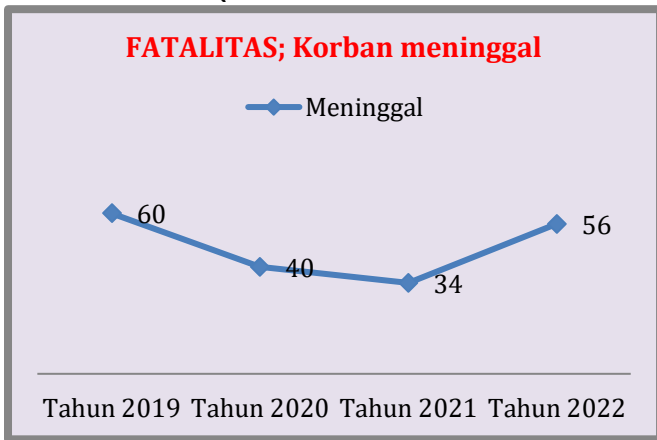
Secara keseluruhan korban, tahun 2021 dan 2022 terjadi Peningkatan dari 249 korban menjadi 269 korban atau mencapai 8,3%. Untuk korban meninggal dunia terjadi Peningkatan dari di tahun 2021 sebanyak 34 orang dan pada tahun 2022 menjadi 56 orang atau 64,71%. Luka berat pada tahun 2022 sebanyak 5 orang dan luka ringan 208 orang.

Chart III.3
Fatalitas Lakalantas Tahun 2019-2022



Korban meninggal dunia terjadi fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Terjadi penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, dan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami Peningkatan, sedangkan pada 2021 terjadi peningkatan 11,66%. Untuk korban meninggal dan luka berat mengalami penurunan 28,33% pada 2018, dan , pada tahun 2020 mengalami Peningkatan 63,12% pada 2020. Sedangkan luka ringan, terjadi kenaikan dalam kurun waktu 2019-2022. Sedangkan pada tahun 2022 mngalami peningkatan mencapai 8,03%%.

Chart III.4
Fatalitas Lakalantas dari sisi korban jiwa
Tahun 2019-2022





Lakalantas 2022



Target 150 kejadian
Realisasi 208 kejadian
Peningkatan 69%
Kinerja 76%





1

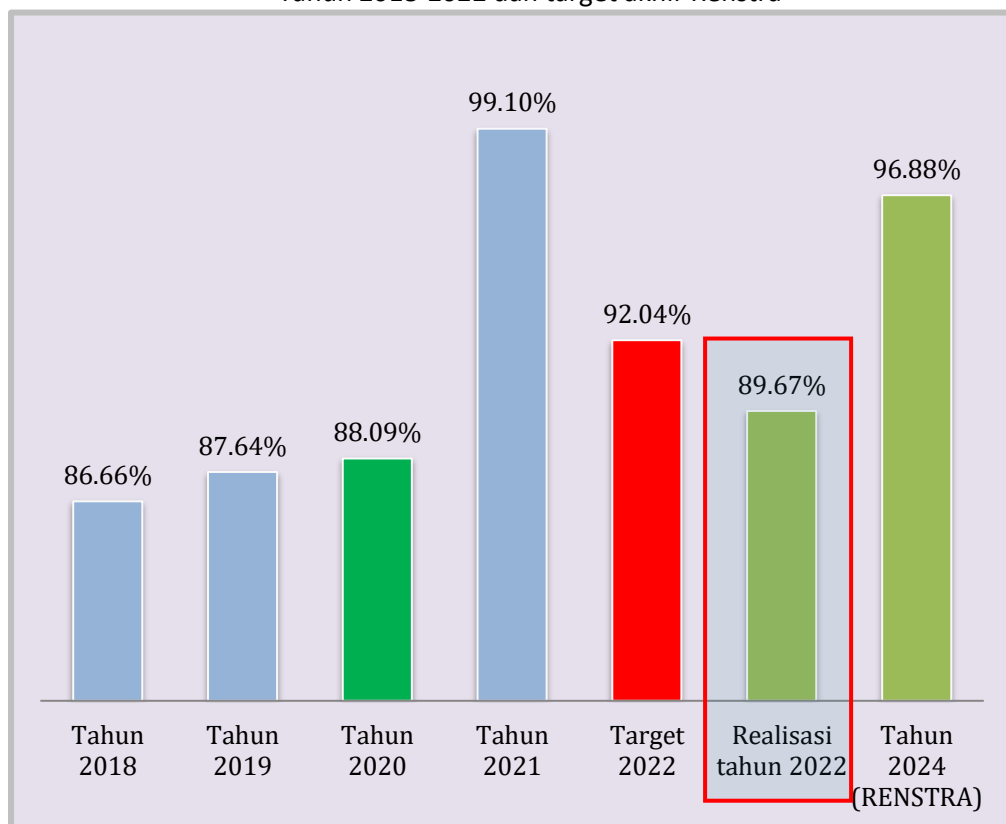
Indikator Program

**Persentase Sarana Prasarana Perhubungan
dalam Kondisi Baik**

Target
92,04%

Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja dari tahun 2018-2022 meningkat 5.40%, meskipun pada tahun 2022 belum sesuai target. Target kinerja 92.04% dan realisasi 89.67%, dalam artian capaian kinerja mencapai 89.67%. Capaian tahun 2022, bila disandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 93%. Hal ini tergambar dalam chart berikut ini :

Chart III.5
Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik
Tahun 2018-2022 dan target akhir Renstra

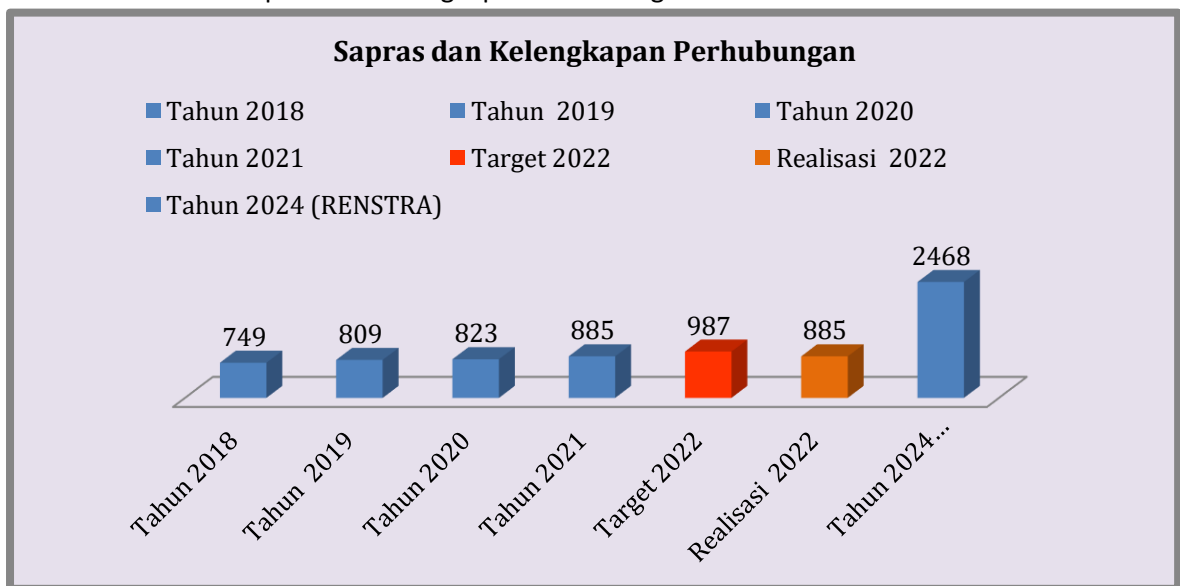


Capaian antara target dan realisasi pada tahun 2022 mengalami Penurunan persentase dari tahun 2021 di tahun 2022 pengadaan sarana dan prasarana mencapai 89.67 % dari Hal ini di sebabkan pada tahun 2022 pengadaan sarana dan prasarana di alihkan ke pemeliharaan sarana dan prasarana hal ini disebabkan karena banyaknya fasilitas perhubungan yang rusak dan tidak berfungsi baik sehingga tahun 2022 di fokuskan pada pemeliharaan khususnya pemeliharaan Penerangan jalan umum

1. Indikator : Jumlah Sarana Prasarana dan Kelengkapan Perhubungan

Indikator jumlah sarana prasarana merupakan indikator dari kegiatan Pembangunan dan Pengadaan sarana prasarana perhubungan. Tahun 2022, sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan target berdasarkan Renstra yakni 987 unit, realisasi 885 unit, jumlah ini mengalami penurunan di sebabkan karena focus pada pemeliharaan kelengkapan sarana perhubungan, hal ini di sebabkan karena banyaknya sarana perhubungan yang rusak.

Chart III.6
Sapas dan Kelengkapan Perhubungan Tahun 2018-2022



**CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2022
=885/893
89,67**

Sarana prasarana perhubungan terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, papan nama jalan, Terminal Tipe C Wonomulyo, Pengujian Kendaraan Bermotor, Tambatan Perahu serta Dermaga Rakyat dan pada tahun 2022 pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan menjadi kewenangan dinas perhubungan yang sebelumnya pada bagian umum sekretariat daerah.

Chart III.7
Sapras dan Kelengkapan Perhubungan Tahun 2022



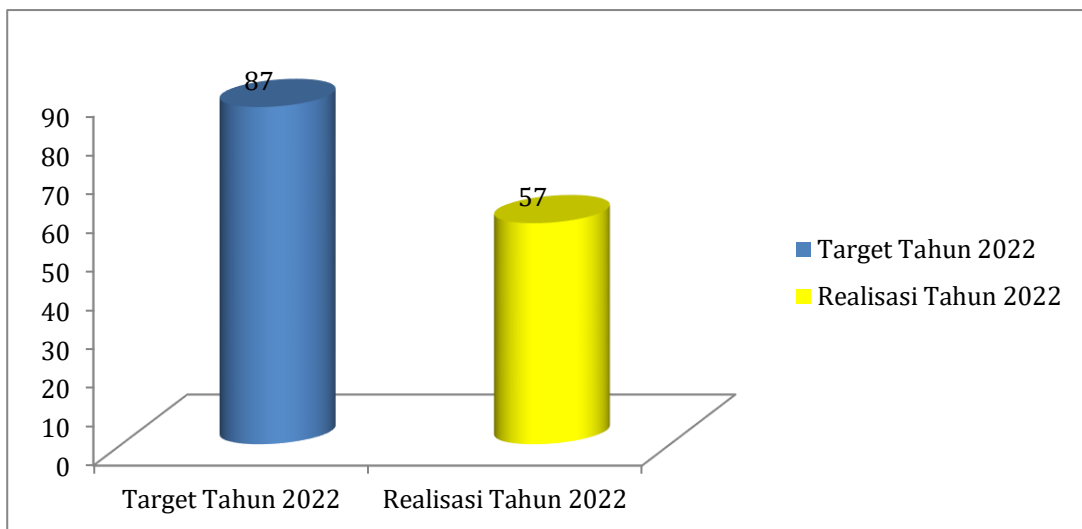
Realisasi kegiatan pada tahun 2022 pada indikator ini pengadaan Sarana dan Prasarana serta kelengkapan perhubungan di fokuskan pada pemeliharaan mengingat banyak fasilitas perhubungan yang sudah mulai rusak dan tidak berfungsi sehingga pada tahun 2022 tidak ada pengadaan sarana dan prasarana perhubungan yang sehingga data tersebut di atas masih pada tahun 2021 jumlah rambu 723, papan nama jalan 133 tambatan perahu 6 lampu Quadril 8 Dermaga 1 Terminal 1 Pengujian Kendaraan 1 dan Sejak tahun 2021 Penerangan Jalan Umum menjadi (PJU) menjadi kewenangan Dinas Perhubungan yang sebelumnya berada di Dinas Tarkim jumlah

lampu jalan tenaga Surya tahun 2021 sebanyak 1068 unit pada pada tahun 2021 ada penambahan 10 unit dan KWH 2 unit namun pengelolaanya di serahkan ke bundes desa galung tulu kecamatan Balanipa dengan adanya PJU pada tahun 2022 Jumlah Sarana dan prasarana perhubungan dari 873 menjadi 1941 hal disebabkan karna adanya penambahan Penerangan Jalan umum

2. Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang diperbaiki

Jumlah sarana prasarana perhubungan yang diperbaiki merupakan indikator dari kegiatan Rehab/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan. Sarana prasarana perhubungan yang diperbaiki pada tahun 2022 berupa Warning light 15. dan rehab lampu jalan sebanyak 42 unit, maka capaian kinerja sebesar 66%.

Chart III.7
Rehab tahun 2022



Sumber daya, Kendala dan Solusi

Indikator Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan terkait pemenuhan indikator sarana prasarana dalam kondisi baik dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana terpapar dari tabel berikut :

Tabel III.2
 Program Kegiatan dan serta Realisasi Anggaran
 Indikator Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik Tahun 2022

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan	Rp. 468,970,151	Rp. 468,970,151	Rp. 468,970,151	100.00%
Rehab/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	Rp. 468,970,151	Rp. 468,970,151	Rp.468,970,151	100.00%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari target kinerja sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebesar 92,04% dan terealisasi 66% dalam artian kinerja mencapai 72,00%. Hal ini disebabkan dari target awal 87 berupa papan nama jalan menjadi rehab warning di samping itu kondisi anggaran yang minim sehingga total realisasi anggaran 468,970,151 terealisasi 100,00 %

Kendala dan solusi terkait pemenuhan indikator sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebagai berikut :

KENDALA

- Kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan yang tidak sebanding dengan alokasi anggaran;
- Kewenangan penanganan terkait status jalan;
- Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan;
- Pemanfaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan masih minim;
- Belum tersedianya masterplan transportasi;
- Belum terwujudnya pembangunan Bandara;



SOLUSI

- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dishub Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Perhubungan RI terkait pemenuhan sarana prasarana keselamatan jalan;
- Melakukan sosialisasi dan juga melakukan pemeliharaan sapsras dan perlengkapan perhubungan;
- Berupaya meningkatkan pemanfaatan terminal dan pengujian kendaraan;
- Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan sapsras perhubungan;



Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik



Target 92,04%
Realisasi 89,67%
Kinerja 66%



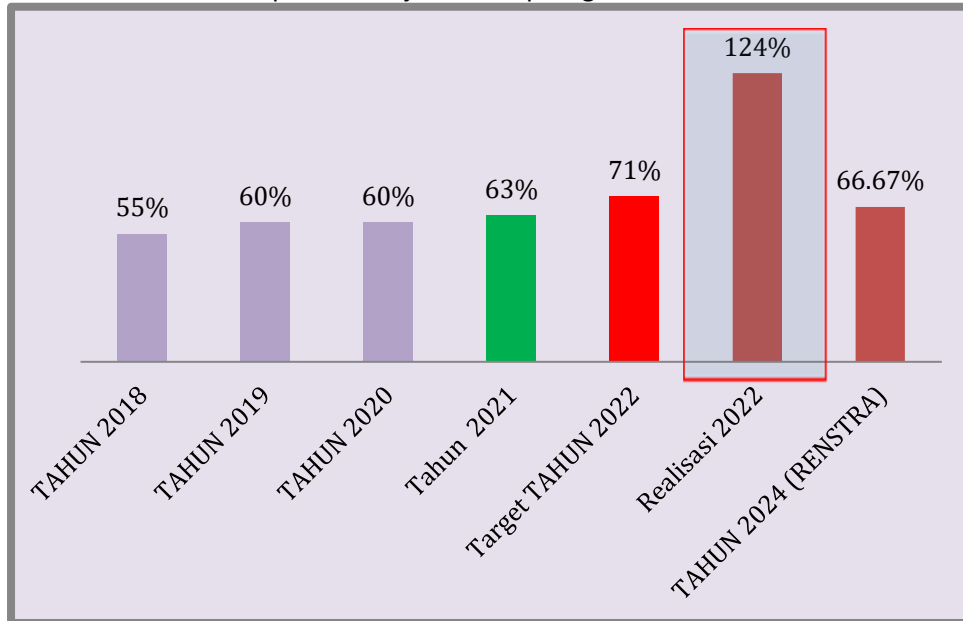
Indikator Program

Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman

Target
71,43%

Pada Tahun 2021, persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 71,43% dan realisasi 126%.. Bila capaian pada tahun 2022 ini disandingkan dengan target akhir Renstra, maka capaian sudah mencapai 186%.

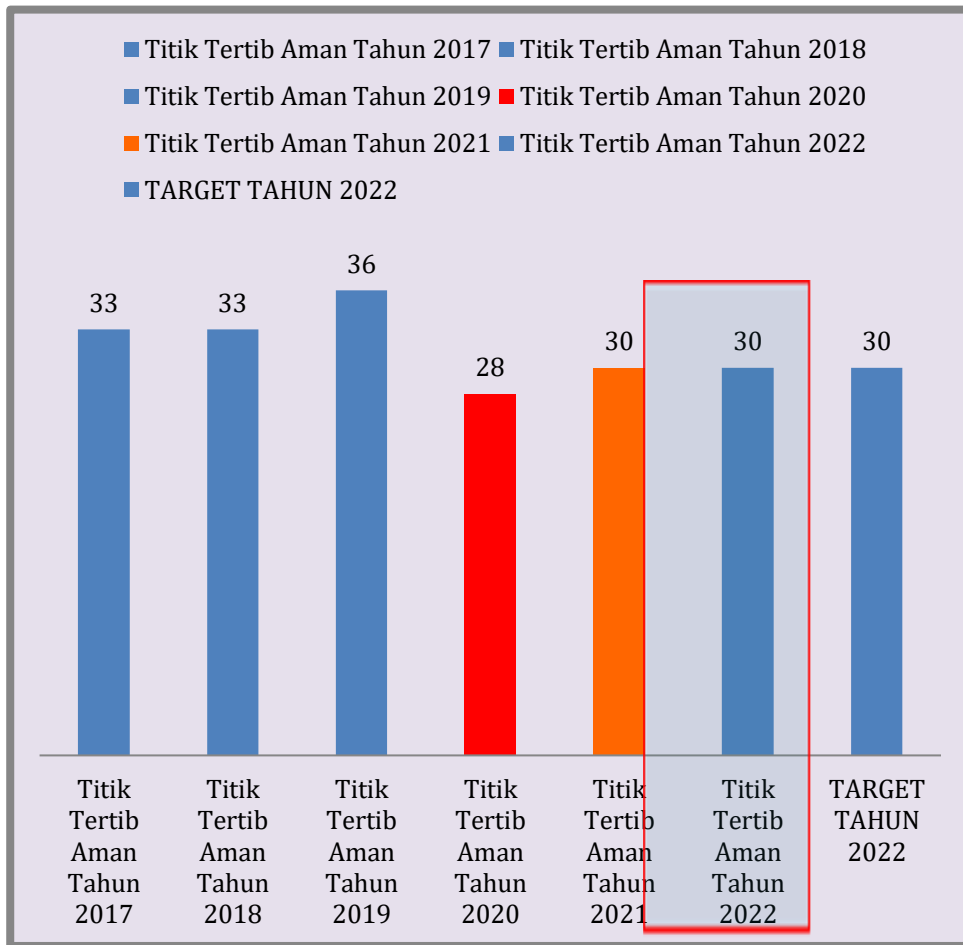
Chart III.8
 Persentase Titik Rawan Kecelakaan Tertib dan Aman, Tahun 2018-2022
 dan capaian kinerja terhadap target akhir Renstra



Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik. Diantara itu pada tahun 2021 terdapat 42 titik tertib aman dari target 30 titik. Angka ini sama pada tahun 2022 yang sudah 42 titik tertib dan aman dari 60 lokasi titik aman. Defenisi titik lokasi tertib dan aman adalah ketika titik rawan kecelakaan tersebut terpasang rambu-rambu lalu lintas dan atau dilakukan pengamanan oleh petugas lapangan Dinas Perhubungan.

Chart III.9

Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman, Tahun 2017-2022



Tabel III.3

Titik Lokasi Rawan Kecelakaan dan Kepadatan Lalu Lintas Tahun 2022

NO	TITIK LOKASI	Tahun 2022	Ket.
1	Sappoang Binuang		Rambu
2	Kanang Binuang		Rambu
3	Pintu Gerbang Polewali		Rambu
4	Tonyaman Binuang		-
5	Depan Terminal tipalayo		-
6	Pertigaan Salu Mandalan		-
7	Pertigaan Lemo		Rambu
8	Jl. Durian	1	Rambu/PAM
9	SDN 001 Polewali	1	PAM
10	SMPN 1 Polewali	1	PAM
11	SDN 026 Polewali	1	PAM
12	Pertigaan DPRD	1	PAM
13	SMA 1 Polewali	1	PAM
14	TK Pertiwi	1	PAM
15	SDN 066 Polewali	1	PAM
16	SMPN 3	1	PAM
17	SDN 028 Pekkabata	1	PAM
18	Pasar Sentral	1	PAM
19	Perempatan kantor bupati	1	PAM
20	Kejaksaan	1	PAM
21	SDN 17 manding	1	PAM
22	SDN 020 Rea barat	1	PAM
23	SMPN 1 Wonomulyo	1	PAM
24	Perempatan 4 terminal	1	PAM
25	Perempatan 4 jansen	1	PAM
26	SMPN 5 Wonomulyo	1	PAM
27	Pantai bahari	1	PAM
28	Sport Center	1	PAM
29	Lokasi keg. Insidentil	1	PAM
30	Jembatan Takatidung Perempatan Andi Latanratu-		Rambu
31	Perempatan Andi Latanratu-Sumur Manurung		PAM
32	Perempatan Andi Latanratu-Andi Tomming	1	PAM
33	Perempatan Andi Depu-Andi Tomming	1	PAM
34	Kampung Tangga Matakali/Mts	1	PAM

35	Labasang Matakali		Rambu
36	Pertigaan Lampa Mapilli		Rambu
37	Simpang tiga Jl. ke Tutar		-
38	Pertigaan Pasar Mapilli	1	Rambu
39	Jembatan Campalagian		Rambu
40	Pasar Campalagian	1	Rambu
41	Depan Masjid Lapeo		Rambu
42	Palippis Campalagian		Rambu
43	Pasar Pambusuang		Rambu
44	Simpang empat Lamasariang		-
45	Simpang tiga samping SMA		Rambu
46	Dekat Patung Andi Depu	1	PAM
47	Simpang empat Depan Masjid		Rambu
48	Simpang tiga Pintu Gerbang Kris		-
49	Simpang tiga eks Pasar Ikan	1	Rambu/PAM
50	Simpang Tiga Depan Madrasah		Rambu
51	Simpang tiga jalan Korban 40.000	1	
52	Simpang empat Jl. Basseang		-
53	Samping Polres Polman		Rambu
54	Simpang empat dekat Telkom		Rambu
55	Simpang tiga jl. GI PLN		Rambu
56	Poros Mamasa Simpang tiga		-
57	Simpang tiga kantor kec. Anreapi		-
58	Simpang tiga Papandangan		-
59	Simpang tiga jl. Kunyi		-
60	Poros Mamasa Leppan Anreapi		-
JUMLAH		30	

Pada tahun 2022, disamping kegiatan rutin pengaturan pengamanan lalu lintas, Kegiatan survei titik rawan kecelakaan juga intens dilakukan. Kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder, Polres Polewali Mandar dan PU PR atau Jasa Marga. Hal ini dilakukan untuk menemukannya lokasi rawan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Hasil survei akan menjadi rekomendasi tentang keselamatan lalu lintas bagi pihak-pihak terkait.

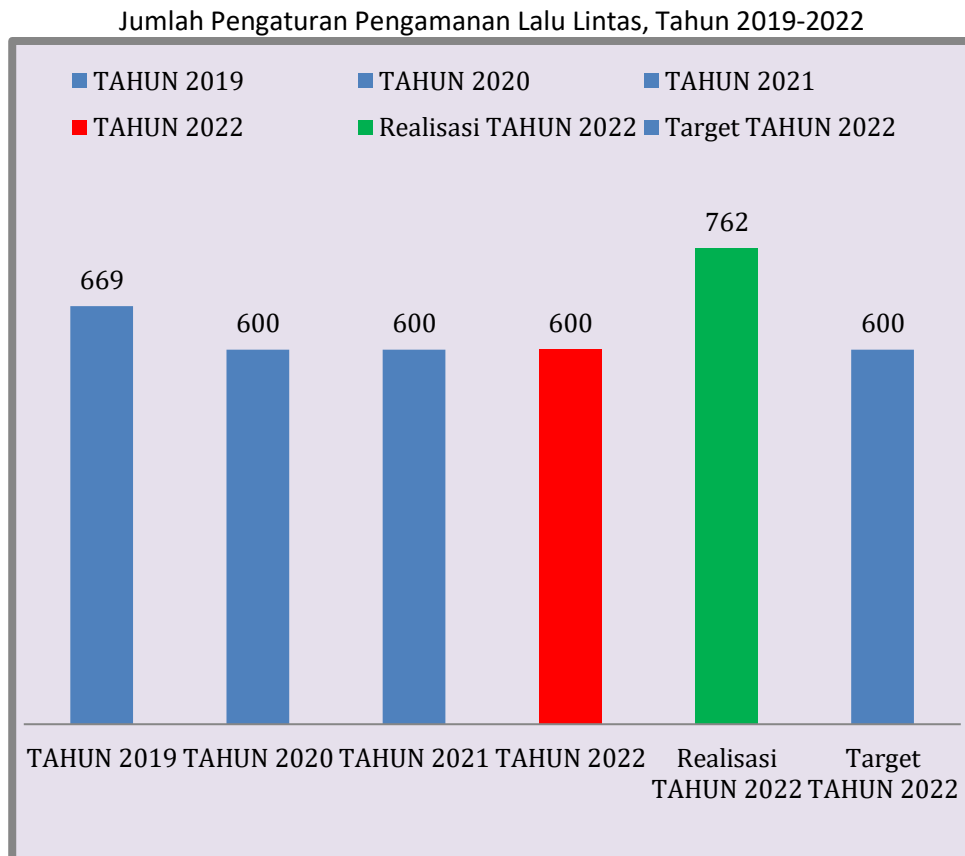


1. Indikator : Jumlah lokasi tertib lalu lintas

Indikator ini ditopang oleh kegiatan Pengaturan dan pengamanan lalu lintas. Pada tahun anggaran 2022, bentuk kegiatan dilakukan dengan pengaturan dan pengamanan titik lokasi rawan kepadatan dan kecelakaan lalu lintas pada 6 lokasi dari target 12 titik lokasi atau 50% lokasi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin harian, jadi aktivitas pengaturan pengamanan lalu lintas dilakukan dengan intensitas tinggi. Pada tahun 2022, kegiatan ini dilakukan sebanyak 762 kali dari target 600 kali atau kinerja mencapai 127%.

Chart III.10



beberapa aktifitas pengaturan pengamanan lalu lintas dilakukan di beberapa lokasi seperti di pasar Sentral pasar Pasar pelitakan pasar Tinambung pasar Wonomulyo, Kegiatan pengamanan pengamanan juga di lakukan Bersama Polres polman melalui operasi terpadu perayaan even yang berlokasi di Sport center yang biasa merupakan pusat even berbagai kegiatan,.

Tabel III.4
Jumlah Kegiatan Pengaturan Pengamanan Lalu Lintas Tahun 2022

No	Bulan	Data Lalu Lintas 2022															Ket		
		Jumlah Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah	Pengawal	Jumlah						
			Pengamanan Titik-Titik Kemacetan	Jumlah	Car Free Day	Jumlah	Pengamanan Pasar	Jumlah	Hari Besar	Jumlah				Insedentil	Jumlah	Event		Jumlah	Kegiatan
1	Januari	62				-PAM Pasar Sentral	8				-PAM Jalan Santai HAB ke-76,Tgl.02	1					- Pengawalan Jalan Santai HAB Ke-76 Tahun 2022	1	
						-PAM Pasar Campalagian	8					-PAM Pelantikan Kepala Desa Terpilih,Tgl.04	1					- Pengawalan Nikah Anak Hj.A.Nursami Masdar	1
						-PAM Pasar Tinambung	9						-PAM Pengantian Anak Hj,Andi Nursami Masdar,S E,M.Adm. KP,Tgl.15 s/d 16	2					
						-PAM Pasar Pelitakan	8												
						- PAM Pasar wono	9												
						- PAM Depan Sekolah	9												
					-PAM Car Free Day	5													
					JUMLAH	0	JUMLAH	5	JUMLAH	51	JUMLAH	0	JUMLAH	4	JUMLAH	0	JUMLAH	0	JUMLAH
2	Februari	52	- PAM depan Sekolah Tgl, 4,8,11,15,18,22,25	7		-PAM Pasar Sentral	8			- PAM di Galung Lombok Tgl 2	1								
						-PAM Pasar Campalagian	8				- PAM Pacuan Kuda Tgl. 19	1							

						-PAM Pasar Tinambung	8														
						-PAM Pasar Pelitakan	7														
						- PAM Pasar wono	8														
					-PAM Car Free Day	4															
					JUMLAH	7	4	39	0	2	0	0	0	0							
3	Ma ret	67	PAM Apel di Kantor Daerah tgl 7,21,28	3		-PAM Pasar Sentral	9			PAM Apel Koordinasi Tgl 17	1			- PAM Pembukaan & Penutupan ST Q tgl 15 & 21	2						
			PAM Depan SMP 3 & SDN 066	9		-PAM Pasar Campalagian	8														
							-PAM Pasar Tinambung	9			PAM Pemeriksaan dan Penertiban Surat-surat Kendaraan Angkutan Umum,Tgl 22 & 25	4									
							-PAM Pasar Pelitakan	9													
							- PAM Pasar wono	9													
							-PAM Car Free Day	4													
								JUMLAH	12	4	44	0	5	0	2	0					
			4	Ap ril	45	- PAM Depan Sekolah			-PAM Pasar Sentral	9						- PAM OPS Ke tu pa t Tg l 28 s/ d 30	3				

						-PAM Pasar Campalagian	8																											
						-PAM Pasar Tinambung	9																											
						-PAM Pasar Pelitakan	8																											
						- PAM Pasar wono	8																											
						JUMLAH	0		0		42		0		0		0		3		0													
5	M ei	67				- PAM Depan Sekolah	7			-PAM Pasar Sentral	8		- PAM HARKI TNAS tgl 20	1		- PAM Rumah Duka Said Saggaf tgl 16	1		- PAM Salyy ang Patt uqdu q tgl 23	1		- PAM OPS Ketu pat Tgl . 01 s/ d 09	9											
						- PAM setiap hari senin di kantor daerah tgl 23 & 30	2			-PAM Pasar Campalagian	8				- PAM Reuni SMP 1 Wonomul yo tgl 5	1							- PAM Manasik Haji tgl 24	1										
									-PAM Pasar Tinambung	8					- PAM kunjungan Pj.Gub. Sulbar tgl 8	1																		
									-PAM Pasar Pelitakan	8																								
									- PAM Pasar wono	8																								
									-PAM Car Free Day	4																								
									JUMLAH	9		4		40		1		2		1		10												
			6	Ju ni	51				- PAM Apel pelayanan Publik tgl 13	1			-PAM Pasar Sentral	8				- PAM Manasik Haji tgl 2	1					- PAM Pengaman	1		-PAM Pengawal an Haji Kloter 13 TGL.26	1						

8	Agustus	63	- PAM Depan Sekolah	9		-PAM Pasar Sentral	9	- Hari Kemerdekaan RI Ke 77	1			- PAM sandeq race tgl 28 s/d 31	4	- PAM Penjemputan haji kloter 13 tgl 08	1	-PAM Pengawasan Haji Kloter 13 Tgl 09	1		
			PAM Apel di Kantor Daerah tgl 01,08,15, 22,29	5		-PAM Pasar Campalagian	9					- PAM Renuhan Suci Tgl 16 Agustus	1						
						-PAM Pasar Tinambung	9												
						-PAM Pasar Pelitakan	9												
						- PAM Pasar wono	10												
				-PAM Car Free Day	4	- PAM Depan Sekolah	9												
			JUMLAH	JUMLAH		JUMLAH	55	JUMLAH	1	JUMLAH	0	JUMLAH	5	JUMLAH	1	JUMLAH	1		
9	September	73				-PAM Pasar Sentral	9			-PAM Wisuda Sarjana di UNASMAN Tgl 13 September	1	- PAM Motoprix Tgl 24-25 September	2						
			PAM Apel di Kantor Daerah tgl 05, 12, 19, 26	4		-PAM Pasar Campalagian	9			-PAM Temu Kangen SMP 1 Polewali Tgl 17 September	1								
						-PAM Pasar Tinambung	9			PAM depan Kantor KPU Tiap Hari Pasar Sentral	9								
						-PAM Pasar Pelitakan	8												
						- PAM Pasar wono	8												
				-PAM Car Free Day	4	- PAM Depan Sekolah	9												
			JUMLAH	JUMLAH	4	JUMLAH	52	JUMLAH	0	JUMLAH	11	JUMLAH	2	JUMLAH	0	JUMLAH	0		

se m be r	PAM Apel di Kantor Daerah tgl 05, 12, 19, 26	4			-PAM Pasar Campalagian	9	PAM Ultah POLM AN Ke-63 tgl 29	1	PAM Nataru tgl 26 Desembe r 2022 - 02 Januari 2023	8	PAM Pam eran Expo di Sport Cent er 26 s/d 31	6				
					-PAM Pasar Tinambung	9			APEL Gelar Pasukan Pergantia n tahun di polres di tgl 31 Desembe r	1						
					-PAM Pasar Pelitakan	8										
					- PAM Pasar wono	8										
			-PAM Car Free Day	4		- PAM Depan Sekolah	9									
			JUMLAH	4	JUMLA H	4	JUMLAH	52	JUML AH	1	JUMLAH	9	JUM LAH	6	JU M LA H	0
Jumlah Total	762															

Beberapa lokasi titik rawan belum dilakukan pengaturan pengamanan lalu lintas juga dikarenakan keterbatasan jumlah personil petugas lapangan Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk lebih mengefektifkan pengaturan pengamanan lalu lintas, juga dalam beberapa momen tertentu dilakukan rekayasa lalu lintas. Hal ini biasa dilakukan dalam even-even besar tingkat kabupaten yang melibatkan keramaian dan penumpukan kendaraan.



Selain pengaturan pengamanan, juga dilakukan identifikasi titik-titik rawan kecelakaan yang aman dengan indikator terpasangnya rambu-rambu lalu lintas keselamatan jalan pada titik tersebut.

Terpasangnya rambu-rambu lalu lintas dijadikan ukuran, karena tidak semua titik rawan kecelakaan bisa dijangkau dengan intensitas pengamanan personil lapangan, jadi dengan adanya rambu-rambu lalu lintas diharapkan dapat memberikan peringatan atau petunjuk kepada pengguna jalan terkait ketertiban dan keselamatan mereka.

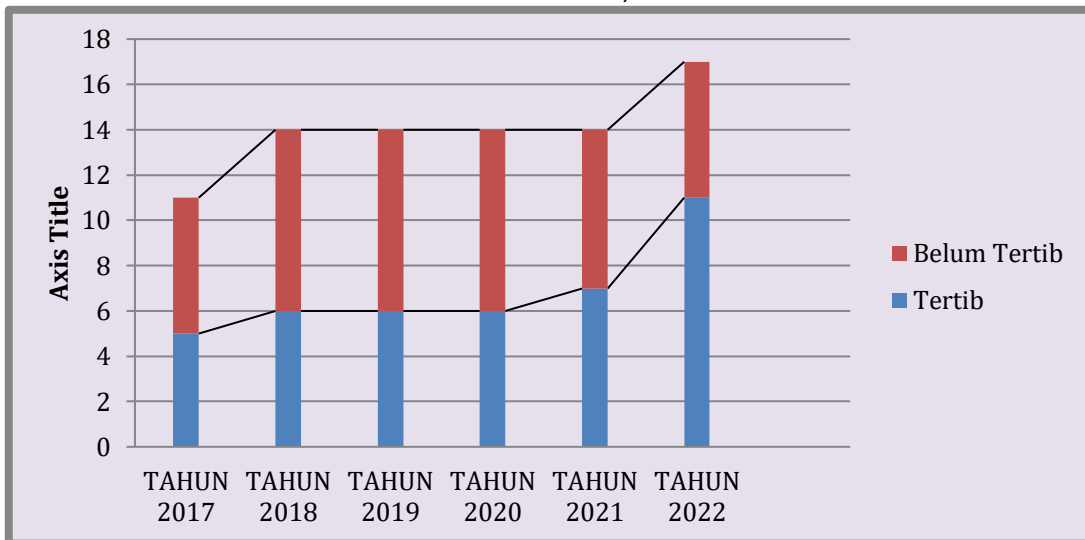


2. Indikator : Titik Lokasi Parkir yang Tertib

Titik lokasi parkir yang tertib didasarkan pada indikator bahwa lokasi parkir telah dipasangi rambu parkir dan atau fasilitas parkir. Data pada tahun 2022, ada penambahan titik parkir 11 titik lokasi parkir dengan 11 lokasi tertib, ada 6 belum tertib

Pada tahun 2022, 11 lokasi tertib dari 17 titik lokasi dari target 9 lokasi atau 78%., Asumsi tertib ketika terdapat rambu parkir dan atau terdapat petugas parkir. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan, bertambahnya pusat keramaian dan juga kapasitas petugas parkir.

Chart III.11
Ketertiban Titik Lokasi Parkir, Tahun 2017-2022



Terkait sumber daya perparkiran, maka beberapa lokasi parkir dialihkan pengelolaan pada pihak ketiga. Diantara lokasi tersebut adalah lokasi parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Mandar, dan Pasar Wonomulyo dan beberapa Lokasi parkir masih proses lelang pengelolaan adalah lokasi parkir Pasar Sentral Pekkabata, Pasar Baru Polewali. Dalam konteks ini, namun ada lokasi penambahn titik parkir pasar matakalii , pasar kanusuang pengelolaan perparkiran pada unit kerja Dinas Perhubungan pada pemantauan dan pengawasan lokasi.

Tabel III.5
Titik Lokasi Parkir Tertib Tahun 2022

NO	Lokasi parkir	Kecamatan	Jenis		Keterangan	Persentase
			Area tepi Jalan	Area parkir khusus		
1	Pantai Bahari	Polewali	√		Tertib	65%
2	Pasar Polewali	Polewali	√		Tertib	
3	Kantor Samsat	Polewali		√	belum tertib	
4	Kantor Capil	Polewali		√	Tertib	
5	Pasar Sentral	Polewali	√		Tertib	
6	Rumah Sakit	Polewali		√	Tertib	
7	Pasar Pelitakan	Pelitakan	√		belum tertib	
8	Pasar Wonomulyo	Wonomulyo	√		Tertib	
9	Pasar Luyo	Luyo	√		belum tertib	
10	Pasar Tinambung	Tinambung	√		belum tertib	
11	Kantor Lapas	Polewali		√	belum tertib	
12	Alun- Alun Polewali	Polewali	√		Tertib	
13	Puskesmas Wono	Wonomulyo	√		Tertib	
14	Pasar Malam Tinambung	Tinambung	√		belum tertib	
15	Pasar Mapilli	Mapilli	√		Tertib	
16	Pasar Kanusuang	Mapilli	√		Tertib	
17	Pasar Matakali	Matakali			Tertib	

Meskipun kinerja cukup tinggi, tetapi terkait parkir ada beberapa faktor yang tidak bisa dipisahkan. Asumsi bahwa parkir sangat terkait erat dengan pelayanan dan keamanan kendaraan merupakan diantara beberapa asumsi yang berkembang. Padahal kalau kita bicara perparkiran, sandaran hukumnya tetap pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi ukuran

kinerjanya tetap pada teraturnya kendaraan demi lalu lintas angkutan jalan yang tertib dan aman.

Sumber daya, Kendala dan Solusi

Indikator Titik Rawan Kecelakaan dan Kepadatan Tertib Aman

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.6

PROGRAM DAN REALISASI ANGGARAN 2022				
INDIKATOR PERSENTASE TITIK RAWAN KECELAKAAN YANG TERTIB DAN AMAN				
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	244,177,900.00	244,177,900.00	244,177,300.00	100%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	30,613,100	118,929,000	118,875,000.00	99.95%
Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesyaratan dan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kabupaten/Kota	30,613,100	118,929,000	118,875,000.00	99.95%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Target kinerja 71,43 % dan realisasi 100%, artinya capaian kinerja Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman mencapai 100%. Dari sisi realisasi Anggaran terealisasi 99.99 % dari total anggaran 244.177.900

Kendala dan solusi terkait indikator titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman seperti tertera di bawah ini :

KENDALA

- Banyaknya titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar, sangat terkait banyak faktor terutama Penerangan Jalan Umum (PJU) dan kinerja

pemenuhan PJU ini tidak berada dalam wilayah kerja Dinas Perhubungan;

- Banyak titik rawan kecelakaan yang berada jauh dari pusat kota, sehingga menyulitkan untuk penertiban lalu lintas;
- Masih seringnya kendaraan parkir di badan jalan, sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan dan mengganggu arus lalu lintas;
- Kuantitas dan kualitas Petugas lapangan yang masih terbatas dan termasuk status petugas lapangan yang PTT.



- Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang parkir di badan jalan Nasional, dan melakukan kajian terkait upaya pemasangan teknologi pengawasan arus lalu lintas / CCTV;
- Menekankan kedisiplinan tugas lapangan serta pendekatan kekeluargaan terhadap petugas lapangan Dinas Perhubungan.

Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Tertib dan Aman



Target 71,43%
Realisasi 100%
Kinerja 126%



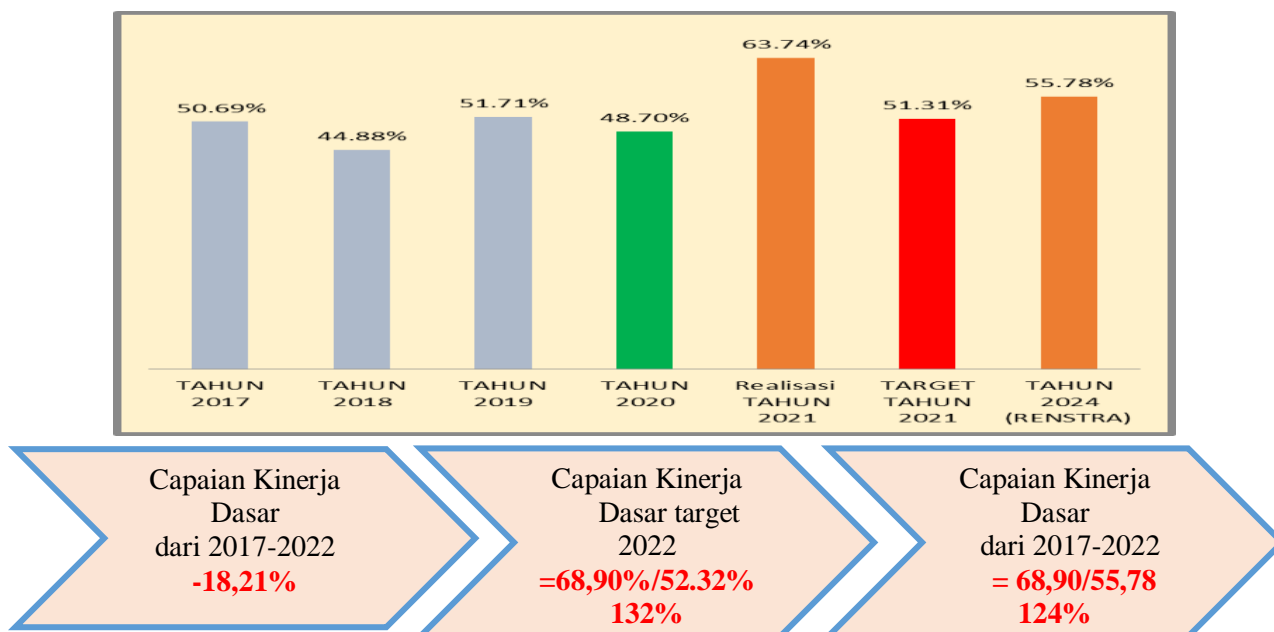
Indikator Program

**Persentase Angkutan Umum yang Sesuai
Standar Keselamatan**

Target
52,32%

Chart III.12

Angkutan umum yang Sesuai Standar Keselamatan, Tahun 2018-2022 dan capaian kinerja terhadap akhir tahun Renstra



Pada tahun 2022, persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 52.32% realisasi 68,90% capaian kinerja 123%. Hal ini diperoleh dari realisasi uji KIR 68,90% dan pelayanan angkutan melalui kendaraan dan penumpang keluar-masuk terminal Wonomulyo sebesar 20286. Capaian kinerja dasar 126 % Capaian tahun 2022 mencapai 68,90 % bila disandingkan dengan target akhir tahun Renstra pada 2024.

Selisih angka dari target yang ditetapkan dan penurunan persentase realisasi pada tahun 2022 disebabkan karena adanya kenaikan Tarif angkutan dan pengujian kendaraan bermotor tidak beroperasi selama dua (1) bulan.

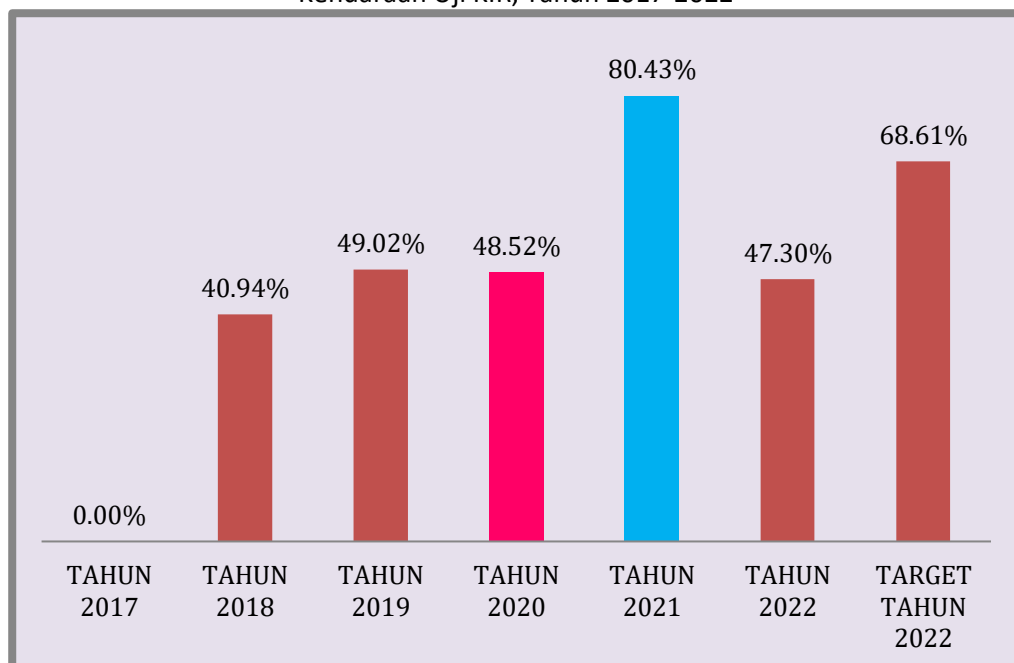
Angkutan umum yang sesuai standar keselamatan diukur berdasarkan kendaraan yang telah lulus uji KIR dan tingkat pelayanan angkutan. Hal ini didasarkan pada bahwa ketika kendaraan telah lulus uji KIR berarti secara fisik kendaraan sudah memenuhi standar kelaikan jalan, karena telah melewati serangkaian uji pada beberapa bagian kendaraan seperti rem, lampu, kaca dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat pelayanan angkutan, bahwa kendaraan akan beroperasi keluar-masuk terminal ketika standar kelaikan terpenuhi dan juga beberapa fasilitas terkait kenyamanan dan keamanan penumpang bisa mereka lengkapi.

Fluktuasi realisasi standar keselamatan angkutan umum dikarenakan terjadi pula ketidakstabilan kendaraan wajib uji dan rasio antara angkutan dan penumpang yang keluar-masuk terminal. Operasional kendaraan pribadi sebagai angkutan umum dan banyak kendaraan numpang uji merupakan diantara faktor fluktuasi angka realisasi indikator.

1. Indikator : Jumlah Kendaraan Uji KIR

Pada tahun 2022, realisasi kendaraan yang melakukan uji KIR mencapai 47.30% dari target 68.61%. Dengan begitu berarti capaian kinerja jumlah kendaraan uji KIR di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Polewali Mandar pada tahun 2022 yaitu 69%.

Chart III.13
Kendaraan Uji KIR, Tahun 2017-2022



Menghitung capaian realisasi kinerja kendaraan uji KIR didasarkan pada jumlah kendaraan uji KIR dibagi kendaraan wajib uji. Untuk tahun 2022, kendaraan wajib uji sama dengan pada tahun 2021 menurun yakni 3571 unit.

Sederhananya, pada tahun 2022, kendaraan yang melakukan uji KIR 1689 dengan kendaraan wajib uji 3571 berarti persentasenya 47,30%. Angka ini sebenarnya turun dibanding tahun 2021 yang realisasi kendaraan uji KIR 2872 unit dengan kendaraan wajib uji 3571 yang persentasenya 80,43%. Proyeksi tahun 2022 ini didasarkan pada data capaian 2021,

kinerja pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar prospektif dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, seperti pada data berikut ini :

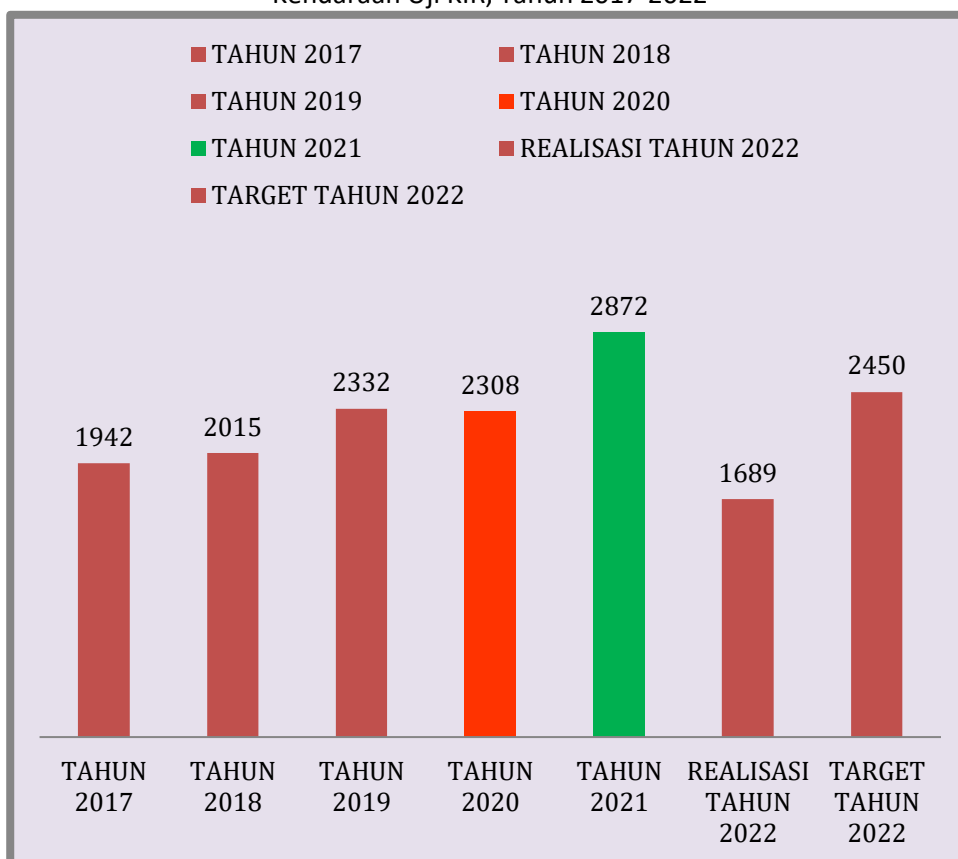
Tabel III.7
Kendaraan Laik Jalan 2018-2022

KENDARAAN LAIK JALAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Kendaraan Uji KIR	2059	2332	2308	2872	1689
Kendaraan Wajib Uji	5029	4757	4757	3571	3571
PERSENTASE	40.94%	49.02%	48.52%	80.43%	47.30%

Tabel di atas menunjukkan bagaimana perbandingan antara kendaraan yang diuji dengan kendaraan wajib uji. Setiap tahun terus mengalami lonjakan persentase,. Detail jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR pada tahun 2022 sebagaimana chart di bawah ini :

Chart III.14

Kendaraan Uji KIR, Tahun 2017-2022



Tabel III.8

DAFTAR JUMLAH KENDARAAN DI UJI DALAM TAHUN 2022

NO	BULAN	JENIS KENDARAAN											JLM KEND	KET
		MPU	MOBIL BUS			MOBIL BARANG								
			BESAR	SEDANG	KECIL	TRUCK 6 RODA KEATAS	TRUCK 6 RODA	TRUCK 4 RODA	PICK UP	KEND. RODA 3	KEND. KHUSUS	GANDENGAN/ TEMPELAN		
1	JANUARI	-	-	-	2	14	22	-	61	-	-	-	99	
2	FEBRUARI	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
5	MEI	-	-	2	3	21	46	-	129	-	-	-	201	
6	JUNI	-	-	-	2	39	57	1	221	-	-	-	320	
7	JULI	-	-	1	3	4	23	-	192	-	-	-	223	
8	AGUSTUS	-	-	1	2	12	13	-	79	-	-	-	107	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	9	17	-	83	-	-	-	109	
10	OKTOBER	-	-	-	-	9	19	-	106	-	-	-	134	
11	NOVEMBER	-	-	-	1	19	72	-	175	-	-	-	267	
12	DESEMBER	-	-	-	1	30	58	-	137	-	-	-	226	
	JUMLAH	0	0	4	14	159	327	1	1184				1689	

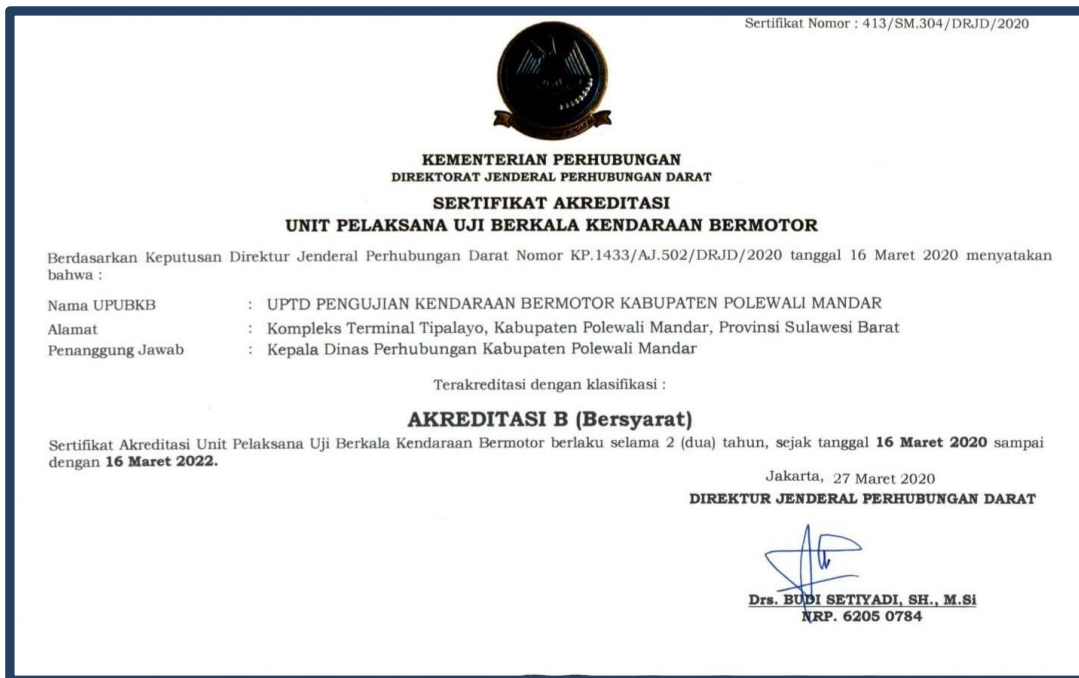
Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR adalah mobil Pick-Up dan disusul jenis-jenis mobil yang lain. Kendaraan roda tiga yang dimaksud di atas bukanlah Bentor, melainkan kendaraan roda tiga yang lain seperti motor pengangkut sampah.

Pada tahun 2022, rata-rata Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar, menguji antara 7-8 unit kendaraan dengan rasio pembagi 235 hari kerja dalam setahun.

Dalam proses peningkatan pelayanan dan demi standar kualitas dan akurasi alat uji, maka Kementerian Perhubungan RI telah mensyaratkan bahwa setiap Pengujian Kendaraan Bermotor wajib melakukan kalibrasi alat uji dan uji sertifikasi. Terkait kalibrasi dan pelayanan serta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2022, juga sudah dilakukan pemeliharaan beberapa alat uji.

Pada tahun 2021 pula, pengujian kendaraan bermotor Polewali Mandar merupakan satu-satunya pengujian kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Barat yang terakreditasi. Dalam artian, hanya Pengujian kendaraan Polewali Mandar yang boleh melakukan uji kendaraan di Provinsi Sulawesi Barat.





Setelah Kalibrasi dilakukan pada tiap tahun, , Pengujian Kendaraan Kabupaten Polewali Mandar telah terakreditasi B (Bersyarat) dengan beberapa peralatan yang mesti diupgrade kapasitasnya. Terkait hal tersebut, tim Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar telah mengupayakan berbagai kekurangan dokumen dan persyaratan lain dan hingga kini, tinggal menunggu hasil verifikasi dari pihak Kementerian Perhubungan RI.

Terkait Kalibrasi dan Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor, berdasarkan surat edaran Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SE.1/AJ.502/DRJD/2019 bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak memiliki penetapan akreditasi dari Dirjen Perhubungan Darat dan belum menetapkan Buku Lulus Uji Elektronik (BLUe) sampai dengan batas waktu 31 Desember 2019, maka Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut dilarang untuk menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Terkait hal tersebut, maka pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Polewali Mandar telah menggunakan Blue berupa kartu sebagai bukti lulus uji.

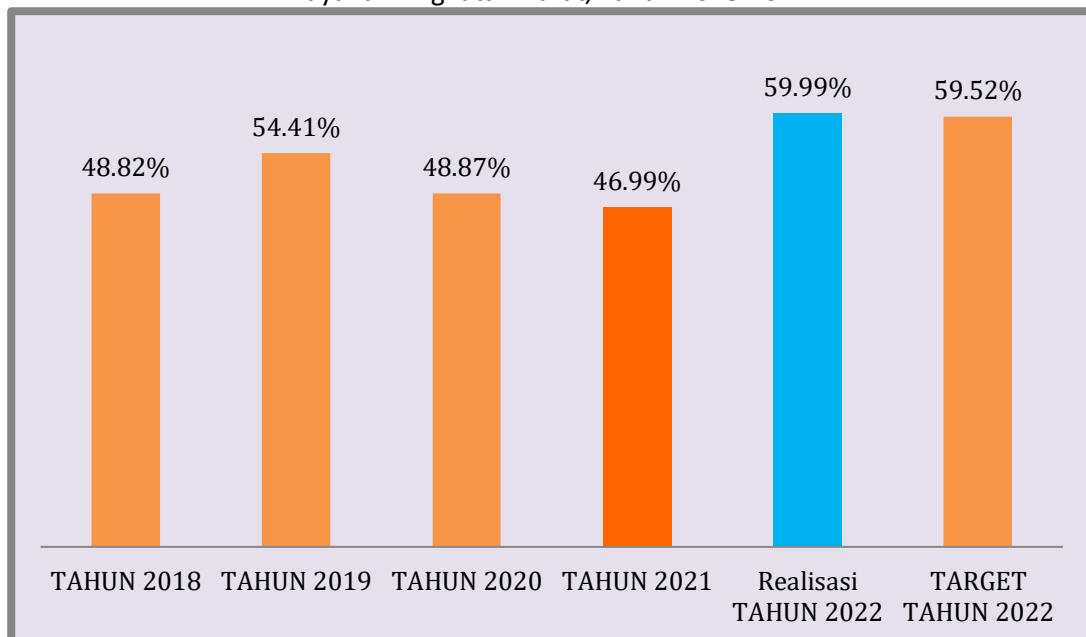
Di Provinsi Sulawesi Barat, hanya pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Polewali Mandar yang telah kalibrasi dan mengajukan akreditasi, maka ke depan peluang untuk meningkatkan jumlah kendaraan yang uji berkala di Kabupaten Polewali Mandar menjadi terbuka lebar.

2. Indikator : Jumlah Angkutan dan Penumpang yang Keluar-Masuk Terminal

Berdasarkan kewenangan, Kabupaten Polewali Mandar mengelola Terminal Tipe C, yakni Terminal Wonomulyo. Indikator pelayanan angkutan juga berdasar pada jumlah angkutan dan penumpang yang keluar-masuk terminal. Pada tahun 2022, target 59,52% dari 12.000 unit angkutan dan 20.500 orang penumpang yang keluar-masuk terminal dan terealisasi 59,99%, artinya kinerja mencapai 166%.

Angka ini naik dibanding capaian persentase pada tahun 2021 yang mencapai angka 46,99%. seiring dengan melandainya pandemi Covid-19 telah berpengaruh besar terhadap pemanfaatan angkutan umum pedesaan maupun terminal di Wonomulyo.

Chart III.15
Layanan Angkutan Darat, Tahun 2018-2022



Dari segi pengguna jumlah angkutan dan penumpang justru meningkat. Fasilitas terminal yang menua dan juga keberadaan terminal liar merupakan diantara problem pemanfaatan terminal tipe C Wonomulyo yang belum begitu optimal. Hal lain tentu, sebagai alat transportasi utama masyarakat Polewali Mandar.

Tabel III.9
Layanan Angkutan Darat Tahun 2018-2022

LAYANAN ANGKUTAN DARAT	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Angkutan keluar-masuk terminal	6010	28208	35942	15742	20286
Penumpang keluar-masuk terminal	12310	51848	73541	33501	33816
Rasio : Penumpang/Angkutan	2.0	1.8	2.0	2.1	1.7
PERSENTASE	48.82%	54.41%	48.87%	46.99%	59.99%

Dari tabel di atas, rasio layanan angkutan umum pada tahun 2022 yakni 1.7, menurun dibanding pada tahun 2021 yang hanya 2.1. Rasio ini dimaknai sebagai keterpenuhan angkutan oleh penumpang.

Tabel III.10
Angkutan dan Penumpang Keluar-Masuk Terminal Wonomulyo Tahun 2022

URAIAN	SATUAN	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
Terminal Wonomulyo														
Angkutan Darat	Unit													
Masuk		261	330	272	236	773	1210	1130	1290	1159	1109	1239	1134	10143
Keluar		261	330	272	236	773	1210	1130	1290	1159	1109	1239	1134	10143
Jumlah		522	660	544	472	1546	2420	2260	2580	2318	2218	2478	2268	20286
Penumpang	Orang													
Masuk		367	645	416	332	1176	2056	1795	2085	1894	1812	2257	2147	16982
Keluar		355	635	407	330	1170	2041	1780	2075	1874	1800	2240	2127	16834
Jumlah		722	1280	823	662	2346	4097	3575	4160	3768	3612	4497	4274	33816
Rasio		1,38	1,93	1,51	1,40	1,51	1,69	1,58	1,61	1,63	1,63	1,81	1,88	1,67

Dari tabel tersebut dapat dicermati bahwa rasio tertinggi layanan angkutan darat terjadi pada bulan Januari yakni 2,74 dan terendah pada bulan April dengan rasio 1,51. Secara keseluruhan rasio penumpang dari setiap angkutan selama tahun 2022 adalah 2 sampai 3 orang penumpang.

Rasio layanan angkutan darat dapat dibaca bahwa rata-rata angkutan darat terutama angkutan pedesaan dan perkotaan yang keluar-masuk di Terminal Wonomulyo hanya memuat 1 atau 2 penumpang. Ini disebabkan karena meningkatnya pemanfaatan kendaraan pribadi di Kabupaten Polewali Mandar, terutama kendaraan roda dua/motor. Keberadaan Bentor yang semakin efektif melayani masyarakat, juga menjadi salah satu penyebab meskipun secara standar

keselamatan sangat minim. Belum lagi mulai berkembangnya jasa transportasi berbasis aplikasi, ini memberikan pengaruh yang tidak sedikit terhadap pemanfaatan Terminal tipe C Wonomulyo.

pada tahun 2022, disaat config 19 sudah mulai berkurang mobilitas orang dan angkutan, mulai menunjukkan kenaikan jumlah penumpang terhadap pemanfaatan terminal, tak terkecuali terminal tipe C Wonomulyo.



3. Indikator : Jaringan Trayek Efektif

Trayek merupakan diantara hal tak terpisahkan dari keberadaan angkutan umum. Rute ini menjadi salah satu indikator bagaimana manajemen angkutan sesuai standar keselamatan angkutan publik dikelola dan ditata dengan terencana. Jumlah penumpang dan keberadaan kendaraan pribadi merupakan tantangan tersendiri dari operasional trayek angkutan dan jumlah angkutan sendiri. Fenomena angkutan umum berbasis aplikasi juga menjadi sesuatu tak terbantahkan dari perkembangan dan dinamika dunia transportasi.

Meskipun begitu, keberadaan angkutan pedesaan merupakan fakta yang mesti dikelola operasionalnya. Diantara gempuran tantangan yang tersebut di atas, keberadaan angkutan umum di Kabupaten Polewali Mandar juga memberikan

kontribusi optimal bagi mobilitas orang dan barang, diantara salah satunya adalah dengan menata dan mengefektifkan jaringan trayek.

Terdapat beberapa jaringan trayek efektif di Kabupaten Polewali Mandar yakni yang berada di Jalan Poros Nasional. Hal ini dikarenakan akses jalan dan jumlah penumpang yang lebih potensial di jalan poros. Sementara trayek yang berada di pedesaan keberadaanya insidental sesuai keperluan penumpang maupun kepentingan angkutan terkait. Meskipun begitu, penataan tetap penting dilakukan untuk memberikan identitas rute angkutan umum di Polewali Mandar.



Tahun 2022, terdapat tiga (3) trayek angkutan umum di Polewali Mandar yang ditertibkan yakni, trayek Polewali – Wonomulyo, Wonomulyo – Tinambung dan Wonomulyo – Tapango. Di antara ketiga trayek tersebut terdapat 298 unit angkutan umum pedesaan yang menjadi sasaran kegiatan. Kegiatan ini sesuai dengan target yakni tiga (3) trayek tertib dari target 300 unit angkutan umum, dilakukan penertiban 298 unit tertib penggunaan trayek di dalam artian capaian kinerja mencapai 98%.

Kegiatan ini dilakukan dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melakukan penertiban.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga standar keselamatan dari pelayanan angkutan. Kejelasan trayek akan memberikan jaminan bagi penumpang akan ketersediaan tujuan dan juga identitas khusus bagi angkutan umum menempuh rute serta jaminan aksesibilitas angkutan bagi mobilitas orang dan barang di Kabupaten Polewali Mandar.

4. Indikator : Angkutan Umum yang ditertibkan

Konsep awal kegiatan ini adalah penertiban operasional di jalan raya dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen KIR dan trayek. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan tertib dokumen resmi operasional kendaraan.

Target kegiatan pada tahun 2022 ini jumlah kendaraan yang melakukan uji Kir 1689 dari target 2450 hanya sekitar 68,9 persen

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.11
Realisasi Anggaran
Indikator Persentase Angkutan Umum yang Sesuai Standar Keselamatan Tahun 2022

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	77,061,900	77,061,900	77,061,900	100%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	201,282,700	201,282,700	201,282,700	100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	101,583,600	101,583,600	101,583,600	100 %
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	99,699,100	99,699,100	99,699,100	100%
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	33,929,000.00	33,929,000.00	33,929,000.00	99%
Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesyaratan dan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kabupaten/Kota	33,929,000.00	33,929,000.00	33,929,000.00	99%

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33,224,300.00	33,224,300.00	33,224,300.00	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	33,224,300.00	33,224,300.00	33,224,300.00	100%
Total	33,224,300.00	430,497,900.00	430.443.900	100%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari target kinerja angkutan umum sesuai standar keselamatan sebesar 51.31% dan hanya terealisasi 67.74% dalam artian kinerja mencapai 124.22%. anggaran sebesar 16.00% dari total anggaran awal Rp. 430.497.900 terealisasi 100%

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator kinerja angkutan umum yang sesuai standar keselamatan pada tahun 2022, terlihat pada gambaran di bawah ini :

KENDALA

- Tumbuhnya kendaraan pribadi sebagai angkutan umum, termasuk Bentor;
- Lemahnya kesadaran pengguna kendaraan atau pengusaha angkutan untuk melakukan uji berkala kendaraan bermotor sebagai sarana mengukur tingkat standar keselamatan kendaraanya;
- Minimnya pemanfaatan terminal oleh angkutan umum dan penumpang, ini terkait dengan fasilitas yang masih minim, sehingga mirip sebagai terminal lintasan;
- Kapasitas Petugas lapangan Dinas Perhubungan yang masih terbatas dan termasuk status petugas lapangan yang PTT.



- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Kepolisian terutama Satlantas Polres Polewali Mandar untuk penertiban angkutan umum;
- Melakukan inspeksi dan pengawasan terkait KIR kendaraan angkutan umum selain terus melakukan pembenahan sarana prasarana terkait alat uji, disamping melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap pengguna jalan terkait keselamatan berlalu lintas;
- Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap angkutan umum serta koordinasi dengan Polsek Wonomulyo dan Babinsa terkait pemanfaatan Terminal Wonomulyo;
- Menekankan kedisiplinan tugas lapangan serta pendekatan kekeluargaan terhadap petugas lapangan Dinas Perhubungan



Persentase Angkutan Umum yang Sesuai Standar Keselamatan



Target 52,32%

Realisasi 100%

Kinerja 156%

SASARAN 1

**Meningkatnya Kualitas
Manajemen Perkantoran**

Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat

Target

BAIK

Pelayanan Dinas Perhubungan bertumpu pada beberapa unit kerja; perparkiran, pelayanan terminal, pengujian kendaraan bermotor. Meskipun begitu, terdapat pula pelayanan yang bersentuhan langsung manajemen perkantoran Dinas. Untuk melihat kualitas manajemen perkantoran dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Jumlah responden berdasarkan hasil kuisioner sebanyak 150 orang, jumlah tersebut sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar dengan dasar “ (Jumlah Unsur + 1) x 10 atau (14 +1) x10 = 150 Responden. Responden dipilih secara acak.

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing-masing ke 14 unsur pelayanan. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai IKM dilakukan penghitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian dikonversi dengan nilai dasar 25, dengan rumus : IKM unit pelayanan x 25.

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,73	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,74 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,25 – 100,00	A	Sangat Baik

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus :

- Jumlah nilai per-unsur pelayanan = skor x frekuensi
- Jumlah nilai rata-rata per-unsur = Jumlah nilai per-unsur pelayanan

Responden

➤ Nilai indeks = total jumlah nilai rata-rata

Hasil pengolahan data didapatkan jumlah nilai sebagai berikut :

JUMLAH NILAI PER UNSUR PELAYANAN													
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
45	456	458	455	455	456	454	454	453	455	456	459	453	515
9													

JUMLAH NILAI RATA-RATA PER UNSUR PELAYANAN													
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4

JUMLAH NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR PELAYANAN x 0,071													
U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Dari data table tersebut setelah diolah menggunakan rumus didapatkan nilai seperti di bawah ini :

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x 25 = 30 x 25 = 75
- b. Mutu pelayanan = B
- c. Kinerja unit pelayanan = Baik

Tabel III.12

Hasil dan RTL IKM Tahun 2022



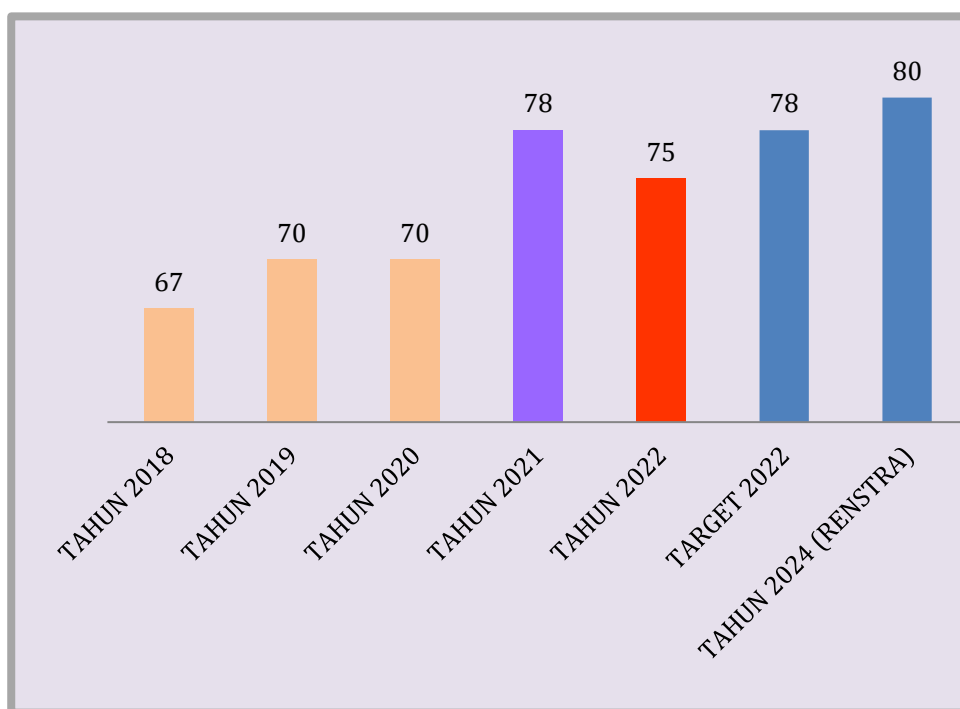
 HASIL DAN RENCANA TINDAK LANJUT SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 		
Jenis Pelayanan:		
NILAI IKM (Setelah dikonversi) <h1 style="text-align: center;">75</h1>	RESPONDEN Jumlah : 150 orang Jenis Kelamin Laki-laki : 132 orang Perempuan : 18 orang Pendidikan SD : - orang SMP : 38 orang SMA : 112 orang D1,D2,D3 : - orang S1/DIV : - orang S2 : - orang S3 : - orang Lainnya : - orang	
	Mutu Pelayanan : B	
	Kinerja Unit Pelayanan : Baik	
	Persyaratan	WAKTU SURVEY
	Prosedur Pelayanan 3.0	8 Agustus 2022 s.d. 27 September 2022
	Persyaratan Pelayanan 3.0	
	Kejelasan Petugas Pelayanan 3.0	
	Kedisiplinan Petugas pelayanan 3.0	
	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3.0	
	Kemampuan Petugas Pelayanan 3.0	
	Kecepatan Pelayanan 3.0	
	Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3.0	
	Kesopanan dan Keramahan Petugas 3.0	
	Kewajaran Biaya Pelayanan 3.0	
Kepastian Biaya Pelayanan 3.0		
Kepastian Jadwal Pelayanan 3.0		
Kenyamanan Lingkungan 3.0		
Kenyamanan Pelayanan 3.4		
NILAI RATA – RATA PER UNSUR TERTIBANG X 0,071 3.0		
RENCANA TINDAK LANJUT		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kedisiplinan Petugas Pelayanan 2. Meningkatkan Kecepatan Pelayanan 3. Mengefektifkan Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Mengoptimalkan Kepastian Jadwal Pelayanan 5. Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan 		
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT		

Chart III.16
 Nilai Konversi IKM, Tahun 2018-2022 dan target akhir tahun Renstra



Kinerja pelayanan berdasarkan survei IKM Dinas Perhubungan, tahun 201-2022 mengalami Penurunan 3 poin dengan capaian kinerja 96%. Selama tahun 2022 melampaui target dan realisasi, begitu juga dengan capaian kinerja mencapai 83%. Dan jika di bandingkan dengan target renstra Capaian ini, damerupakan 93% dari target akhir tahun Renstra pada tahun 2024.

Sumber daya, Kendala dan Solusi
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan sebagaimana tabel berikut :

Dari target indeks kepuasan masyarakat sebesar dengan poin 76 dan hanya terealisasi 75 poin dalam artian kinerja mencapai 96%. Meskipun begitu, penilaian ini termasuk kategori BAIK, i.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator IKM pada tahun 2021, terlihat pada gambaran di bawah ini :

K E N D A L A

- Sarana prasarana pelayanan dalam kondisi butuh banyak perbaikan;
- Gedung kantor yang kurang layak;
- Kapasitas Petugas pelayanan yang masih terbatas dan berstatus PTT.



S O L U S I

- Penyesuaian kinerja
- Memaksimalkan penataan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan;
- Pemeliharaan gedung kantor;
- Menekankan kedisiplinan serta pendekatan kekeluargaan terhadap petugas



SASARAN 2

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah**
Indikator

Predikat SAKIP
Target
BB

Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dapat dilihat dari perencanaan kinerja yang terdiri dari Renja, RKA-DPA dan pelaporan akuntabilitas. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi dilakukan untuk mengeksekusi program kegiatan dari sebuah DPA. Perencanaan Kinerja dilakukan secara bertahap yang diakhiri oleh PK dan Rencana Aksi. Pengukuran kinerja juga dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran dan indikator serta target yang telah ditentukan. Laporan Kinerja tahunan berupa LAKIP yang diakhiri dengan review oleh Inspektorat. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan sebagai berikut :

TAHUN	PREDIKAT
TAHUN 2017	C
TAHUN 2018	C
TAHUN 2019	B
TAHUN 2020	BB
TAHUN 2021	BB
TAHUN 2022	BB
TAHUN 2024 (RENSTRA)	A

Berdasarkan pada hal di atas bahwa rentang tahun 2017-2022, terdapat peningkatan predikat SAKIP. Dari yang stagnan pada 2017-2018 pada predikat nilai C, maka 2018-2019 meningkat menjadi B pada tahun 2022 dengan predikat BB dan pada Tahun 2022 dapat mempertahankan posisi pada Predikat BB. hal ini belum mencapai tarhet akhir tahun Renstra, yakni predikat A.

Sumber daya, Kendala dan Solusi

Indikator Predikat SAKIP

Serangkaian program kegiatan dilaksanakan dengan penjabaran pembiayaan dengan tingkat realisasi keuangan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Predikat SAKIP dengan Predikat BB, merupakan realisasi yang sesuai target. Dari sisi realisasi program kegiatan terlaksana 100%.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator Predikat SAKIP pada tahun 2022, terlihat pada gambaran di bawah ini :

KENDALA

- Pengelolaan data dan kinerja perencanaan yang sentralistik; pada subag perencanaan;
- Pengukuran kinerja dan transparansi penilaian SAKIP belum optimal.





SASARAN 3

**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator

Opini Pengelolaan Keuangan

Target

WTP

Berdasarkan pada capaian Opini WTP Kabupaten Polewali Mandar dalam 2 tahun terakhir, maka diharap Dinas Perhubungan menjadi bagian integral dari bersihnya pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Sumber daya, Kendala dan Solusi

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja Opini Pengelolaan Keuangan selalu merujuk pada capaian kinerja pengelolaan keuangan Daerah yang WTP. Untuk mendukung hal tersebut, realisasi program kegiatan terkait pengelolaan keuangan terlaksana 100% dan capaian kinerja mencapai 100%.

Adapun kendala yang dihadapi dan solusi yang kemudian ditawarkan terkait pencapaian indikator Opini Pengelolaan Keuangan pada tahun 2022, terlihat pada gambaran di bawah ini :

KENDALA

- Besarnya risiko pengelola keuangan;
- Minimnya pembekalan kapasitas pengelola keuangan;
- Belum optimal administrasi pengelolaan aset.



SOLUSI

- Penyesuaian kerja
- Optimalisasi pendampingan terhadap pengelola keuangan perangkat

daerah ;

- Rutinitas pembekalan kapasitas pengelola keuangan;
- Terus mengupayakan komunikasi dan koordinasi terkait pencatatan aset.

B. Akuntabilitas Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Target pendapatan sebesar Rp 703.300.000 sementara realisasi Rp 425.175.750 kurang dari target Rp. 218.124.250. Artinya, realisasi PAD sebesar 60,45%.

Tabel III.13
Target dan Realisasi PAD Tahun 2022

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA	
				KEKURANGAN	% REALISASI
1	Ret. Pengujian Kend.Bermotor	120,000,000	75,620,000	44,380,000	63.02%
2	Ret. Pemakaian Kekayaan daerah	30,000,000	105,000	29,895,000	0.35%
3	Retribusi Terminal	133,300,000	39,000,000	34,300,000	29.26%
	- T P R	100,000,000	20,000,000	20,000,000	
	- Sewa Ruang	33,300,000	19,000,000	14,300,000	
4	Ret. Tempat Parkir Khusus	400,000,000	299,900,750	100,099,250	74.98%
	- Parkir Khusus	-	150,160,000		
	- Parkir RSUD	-	149,740,750		
5	Retribusi Izin Trayek	20,000,000	10,550,000	9,450,000	52.75%
J U M L A H		703,300,000	425,175,750	218,124,250	60.45%

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Retribusi tempat parker khusus memiliki persentase yang paling tinggi dengan capaian 74,98%, sedangkan capaian paling rendah adalah Retribusi kekayaan daerah hanya sebesar 0,35%.

Hal tersebut dikarenakan bahwa potensi parkir RSUD yang tidak lagi di kelolah oleh dinas perhubungan melainkan sudah di kelola oleh pihak RSUD sendiri

Untuk target retribusi parkir, tahun 2022 terjadi Penurunan target Rp. 2.246.536.000 dari tahun 2022 Rp 683.300.000 Asumsi ini dikarenakan pengelolaan parkir di Pasar Sentral, Pasar Baru dan Pasar Wonomulyo yang akan dikelola oleh pihak ketiga namun pada tahun hanya pasar Wonomulyo yang di kelolah oleh pihak

ketiga sedangkan parkir RSUD mengajukan permohonan untuk mengelola parkir di RSUD Polewali Mandar melalui BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Dari capaian target secara keseluruhan, terdapat kekurangan Rp. 218.214.250, hal tersebut terkait dengan pengelolaan parkir RSUD yang sudah mengelolah sendiri Retribus Parkirnya namun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya dengan selesainya tender pasar wonomulyo dan pada pengujian kendaraan bermotor terdapat kekurangan karena kurangnya kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan

2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

PAGU anggaran sebesar Rp 4.681.595.224, realisasi Rp. 4.589.003.444 sisa anggaran sebesar Rp. 92.591.780 atau terealisasi sebesar 98%. Adapun perincian realisasi belanja daerah ini berasal dari :

1. Realisasi Belanja Operasional

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 4.588.983..293 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 4.581595.224 atau terealisasi sebesar 98.02% dengan perincian terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 2.867.877.774,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 2.960.361.631 atau realisasi 98.01%;
- b. Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 1.815.859..519 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 1.815.753.300 .00atau realisasi 100%.
- c. Belanja Bantuan Sosial 85.500.000 Realisasi 85.446..000, atau sebesar 98,04 %

2. Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 20.000.000 apabila dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 atau terealisasi sebesar 100.00% dengan perincian terdiri dari :

- a. Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi Rp. 20.000.000.00 dibandingkan anggaran Rp. 20.000.000.00 atau terealisasi sebesar 100%;

Tabel III.14

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022

NO. REK.	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2022	LEBIH / KURANG	%
4	PENDAPATAN	683,300,000.00	425,175,750.00	(258,124,250.00)	62.22
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	-	-	0.00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	-	-	0.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DERAH YANG SAH - LR	683,300,000.00	425,175,750.00	(258,124,250.00)	62.22
	Pendapatan Lainnya				
5	BELANJA	4,681,595,224.00	4,588,983,293.00	176,457,931.00	98.02
5.1	BELANJA OPERASI	4,661,595,224.00	4,568,983,293.00	176,457,931.00	98.01
5.1.1	Belanja Pegawai	2,960,361,831.00	2,867,877,774.00	92,484,057.00	96.88
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1,615,733,393.00	1,615,659,519.00	73,874.00	100.00
5.1.3	Belanja Bunga			-	
5.1.4	Belanja Hibah	0	0	83,900,000.00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	85,500,000.00	85,446,000.00	-	99.94
5.2	BELANJA MODAL	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	100.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah			-	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	100.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0.00	0.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	0.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	
	SURPLUS/DEFISIT	(3,998,295,224.00)	(4,163,807,543.00)	(434,582,181.00)	104.14

3. Aset

a. Aset Tetap

Nilai aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan laporan keuangan *audited* tahun 2022 adalah Rp 13.923.479.100,00. Perhitungan nilai aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.998.170.700,00 atau terdapat penambahan nilai aset tetap pada tahun 2022 sebesar Rp149.585.750,00 dan pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp74.894.150,00 :

Saldo per tanggal 31 Desember 2022	Rp.	13.923.479.100,00
Penambahan di Tahun 2022	Rp.	149.585.750,00
Pengurangan Tahun 2022	Rp.	(74.894.150,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	Rp.	13.998.170.700,00

b. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Dinas Perhubungan kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2022 terdapat penambahan senilai Rp20.000.000,00 dan mengalami pengurangan sebesar Rp20.000.000 sehingga saldo per 31

Desember 2022 sebesar Rp0,00, Adapun rincian aset lainnya sebagai berikut

:

Saldo per tanggal 31 Desember 2012	Rp.	0,00
Penambahan di Tahun 2022	Rp.	Rp20.000.000,00
Pengurangan Tahun 2022	Rp.	Rp20.000.000,00
Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022	Rp.	0,00

Tabel III.15

Total Pagu dan Anggaran Tahun 2022

No.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
	TOTAL	4,596,595,224	4,681,595,224	4,589,003,444	97%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,436,871,173	3,436,871,173	3,344,458,993	10%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,960,361,831	2,960,361,831	2,867,877,774	97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,960,361,831	2,960,361,831	2,867,877,774	97%
	Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	306,245,100	306,245,100	306,316,977	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,140,000	50,140,000	5,090,000	10%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,428,000	8,428,000	8,426,277	100%
	Penyediaan Bahan/Material	21,641,700	21,641,700	21,765,300	101%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206,035,400	206,035,400	206,035,400	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69,118,242	69,118,242	69,118,242	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,994,242	26,994,242	26,994,242	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42,124,000	42,124,000	42,124,000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101,146,000	101,146,000	101,146,000	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	101,146,000	101,146,000	101,146,000	100%
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1,159,724,051	1,244,724,051	1,244,647,451	100%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	468,970,151	468,970,151	468,970,151	100.00%
	Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	468,970,151	468,970,151	468,970,151	100%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	77,061,900	77,061,900	77,061,900	100%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	77,061,900	77,061,900	77,061,900	100%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	101,078,100	101,078,100	101,078,100	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	101,078,100	101,078,100	100,975,100	100%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	201,282,700	201,282,700	201,260,700	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	101,583,600	101,583,600	101,583,600	99%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	99,699,100	99,699,100	99,677,100	100%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	244,177,900	244,177,900	244,177,300	100%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan	244,177,900	244,177,900	244,177,300	0.998980986

	Kabupaten/Kota				
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	33,929,000	118,929,000	118,875,000	
	Pelaksanaan Inpeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Pesyaratan dan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Kabupaten/Kota	33,929,000	118,929,000	118,875,000	100%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33,224,300	33,224,300	33,224,300	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	33,224,300	33,224,300	33,224,300	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran awal Dinas Perhubungan Tahun 2022 sebesar awal Rp. 4,596,595,224, namun adan penambahan sebesar 4,681,595,224 dengan realisasi 98,02%.



BAB IV

Penutup

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 disusun untuk memaparkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2022.

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 telah ditetapkan sasaran, program dan kegiatan dengan masing-masing indikatornya. Dari hasil analisa akuntabilitas dan pengukuran kinerja, maka dapat disimpulkan :

A. Sasaran : Meningkatnya kinerja transportasi dengan indikator angka kecelakaan lalu lintas.

Tahun 2022, target 150 kejadian Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas), sementara Lakalantas yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 208 kasus, sehingga capaian kinerja 76%. Berdasarkan itu, maka angka Lakalantas Tahun 2022 mengalami Peningkatan 69% dari 166 kejadian pada tahun 2021.

Dari sisi fatalitas kejadian juga terjadi penurunan. Tahun 2022 terdapat Jumlah peningkatan korban meninggal dunia dari 34 korban pada tahun 2021 naik menjadi 56 korban jiwa atau kenaikan sampai pada angka 64, 7%. Kenaikan ini akibat dari mobilitas orang dan barang yang semakin pada disamping itu adanya pengerjaan jalan Tran sulawesi

B. Indikator Program : Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik

Sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik, target kinerja 92,04% dan realisasi 89,67%, dalam artian capaian kinerja mencapai 66%.

Tahun 2022, tidak ada pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan masih pada angka 885 unit. Namun adan penambahan pada jumlah sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik 15 Warning Light dan 42 Penerangan jalam umum .

- C. Indikator Program : Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman
- Pada Tahun 2022, Titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman, target kinerja 71,43% dan realisasi 100%, dalam artian capaian kinerja mencapai 126%. Jumlah titik rawan kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar yakni 60 titik.
- D. Indikator Program : Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan.
- pada tahun 2022, angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, target 52.32% realisasi 100% capaian kinerja 156%.
- e. Indikator sasaran pada segmen manajemen perkantoran, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan : IKM dengan mutu pelayanan A (Baik), Predikat SAKIP BB dan Opini Keuangan WTP;
- h. Realisasi keuangan, PAGU anggaran sebesar Rp 4.681.591.224, realisasi Rp 4.589.003.444 atau terealisasi sebesar 98%.
- i. Terdapat 11 kegiatan pada 2 program: *pertama*, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Kegiatan Pertama Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kedua Kegiatan Admnistrasi Umum Perangkat Daerah ketiga Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah keempat Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program Kedua Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pertama Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota kedua Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C ketiga Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir keempat Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor kelima Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota keenam Audit dan Inspeksi

Keselamatan LLAJ di Jalan ketujuh Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran atau rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Terkait angka kecelakaan di Kabupaten Polewali Mandar, baiknya lebih mengintensifkan pencegahan dengan inspeksi dan pengawasan serta pemasangan PJU;
2. Sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik, baiknya dipermantap kualitas dan kuantitasnya;
3. Titik rawan kecelakaan tertib dan aman, baiknya dilakukan pengawasan ketat dan optimalisasi rambu keselamatan lalu lintas;
4. Angkutan umum yang sesuai standar keselamatan, baiknya melakukan terobosan untuk meningkatkan kuantitas kendaraan laik jalan dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan darat;
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perhubungan, baiknya dilakukan pembenahan terencana pada segmen sarana dan kualitas petugas pelayanan;
6. Terkait Predikat SAKIP A, baiknya dilakukan perencanaan secara integral seluruh elemen instansi dan secara berjenjang;
7. Opini WTP, baiknya diikuti dengan efisiensi penganggaran dan berorientasi pada tunjangan berbasis kinerja;
8. Terkait PAD, baiknya berbagai sektor juga ikut menyokong pencapaian kerjanya disamping modernisasi perlengkapan pendukung dan efektifitas pengelolaan serta pengawasan yang didorong oleh kepastian regulasi.
9. Baiknya, pandemi disikapi dengan berbagai kegiatan efektif yang berorientasi pada keselamatan bersama dengan tetap mempertimbangkan aspek kinerja organisasi.

Pemaparan capaian kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan terhadap publik dan Pemerintah serta stakeholder lainnya. Laporan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan penyempurnaan strategi pencapaian sasaran kinerja.

Dengan Data capaian kinerja yang telah diuraikan pada laporan ini, serta kendala dan upaya-upaya yang telah dilakukan, diharapkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan semakin baik, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.



LAMPIRAN

Lampiran 1 (Perjanjian Kinerja Dishub Tahun 2022)

Lampiran 2 (Pengukuran Kinerja Dishub Tahun 2022)

Lampiran 3 (Realisasi Anggaran Dishub Tahun 2022)



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Mr. Muh. Yamin Nomor 5 Pekkabata Polewali, Kode Pos
91315 Telepon. 0428-21219 Faks. 0428-21219

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. AKSAN AMRULLAH.,MM**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 20 Maret 2022

Pihak Kedua,
Bupati Polewali Mandar

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. H. AKSAN AMRULLAH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740306 199302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	99,99	71,93
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.224.764.280	APBD
2	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 1.094.107.300	APBD
JUMLAH		Rp 4.318.871.580	APBD


Polewali, 20 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



Drs. H. AKSAN AMRULLAH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197403061993021001

INTEGRATED																
Pejabat	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Indeks infrastruktur perhubungan	angka	71,93			17,93			18			18			18
Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	predikat	Sangat Baik												Sangat Baik
Kepala Dinas Perhubungan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	persen	95,56			23,56			24			24			24
	Meningkatnya															

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DISHUB 2022

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERUBAHAN KABUPATEN FOLEWALLI MANDAR PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Tercapainya dan Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Tahun 2022) yang direalisasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2022				Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Penunjang Daerah yang direalisasi		Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Tahun 2022) (%)		
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	% Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Pendukung SAKOP Perangkat Daerah Optimasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	BB WTP Sangat Baik	17%	579.248.339	21%	705.483.862	17%	560.339.290	43%	1.466.932.866	100%	3.344.468.893	100%	97%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100%	2.960.361.831	22%	639.605.045	16%	520.387.570	43%	1.280.120.495	100%	2.857.877.774	100%	97%	
	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangan	33 Orang	2.960.361.831	33	639.605.045	33	520.387.570	33 Orang	1.280.120.495	33 Orang	2.857.877.774	100%	97%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	308.243.100	38%	46.815.817	26%	46.576.100	93%	95.065.868	100%	306.316.977	100%	100,0	
	Persediaan Pegawai dan Perangkat Kantor	Jumlah Jenis Perengkapan Kantor	10 Unit	20.000.000	10 Unit	0	0	0	10 Unit	0	10 Unit	20.000.000	100%	100,0	
	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis makan minum yang tersedia	3 Jenis	50.140.000	3 Jenis	1.305.000	2 Jenis	7.650.000	3 Jenis	30.500.000	3 Jenis	50.090.000	100%	99,9	
	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis mesin yang tersedia	3 Jenis	8.428.000	3 Jenis	1.014.300	3 Jenis	0	3 Jenis	6.108.777	3 Jenis	8.428.277	100%	100,0	
	Persediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang tersedia	21 Jenis	21.641.700	21 Jenis	2.546.300	20 jenis	8.674.700	21 Jenis	6.849.400	21 Jenis	21.765.300	100%	100,6	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	54 Laporan	200.035.400	12	41.950.017	38 Laporan	30.254.400	54 Laporan	51.987.481	54 Laporan	200.035.400	100%	100,0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	60 Laporan		9		46 Laporan		60 Laporan				100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	100%	68.118.242	6%	3.883.000	22%	18.072.020	100%	33.380.703	100%	68.118.242	100%	100,0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan Listrik	2 Jenis	26.894.242	2 Jenis	3.551.500	2 Jenis	4.872.620	2 Jenis	12.289.703	2 Jenis	26.894.242	100%	100,0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih	25,53 m ²	42.124.000	10.501.500	25,53 m ²	30.1.500	10.200.000	25,53 m ²	21.121.000	25,53 m ²	42.124.000	100%	100,0	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib ketatausahaan kantor	5 Unit	101.148.000	19%	18.300.000		8.300.000	5 Unit	88.338.000	5 Unit	101.148.000	100%	100,0	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Servis Pemeliharaan, Right dan Repair dan Restorasi Perawatan On-Off Operasional Bus Lumpang	2 Jena	101.148.000	2 Jena	19.300.000	15.210.000	8.300.000	2 Jena	56.336.000	2 Jena	151.146.000	100,0	100,0
Jumlah jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan												
Perentase kualitas secara keseluruhan perhubungan dalam kondisi baik	82,04%		4%		0%	49%	65%		66%		66%	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	71,43%	1.244.724.031	33%	192.888.900	66.804.600	238.270.000	126%	746.760.351	126%	1.244.324.300	100,0	100,0
Perentase BDR rawan kecelakaan yang memenuhi standar keselamatan	52,32%		45%		63%	56%	69%		69%		69%	
Penyediaan Penyelenggaraan Jabat di Jalan Kabupaten/Kota	87 Unit	468.970.151	4%	13.232.700	16.796.900	64.576.400	66%	374.365.151	57 Unit	468.970.151	66%	100,0
Rehabilitasi dan pemeliharaan Penyelenggaraan Jalan	57 unit	468.970.151	2	13.232.700	16.796.900	64.576.400	57 Unit	374.365.151	57 Unit	468.970.151	100,0	100,0
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang Terselasa dengan baik	1 Unit	77.051.900	14%	17.640.000	5.801.900	17.640.000	165%	35.980.000	1,66-4656472	77.051.900	165%	100,0
Jumlah Terminal yang terpelihara			0		1	1	1 Paket				100	
Jumlah Fasilitas Terminal yang terpelihara			1.726	17.640.000	5.801.900	17.640.000	20286	35.980.000	1 Paket	77.051.900	155%	100,0
Jumlah keluar masuk kendaraan	12000 Unit	77.051.900	2.825	7.105	11.503		33816				262%	
Jumlah keluar masuk penumpang	20500 orang											
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	9 Lokasi	101.078.100	100%	25.200.000	2.685.000	17.640.000	9 Lokasi	55.450.100	9 Lokasi	100.975.100	100,0	99,9
Jumlah Lokasi Parkir khusus dan tepi jalan yang dibuka												
Jumlah titik lokasi parkir (antar tepi jalan dan tepi khusus)	9 Lokasi	101.078.100	9 Lokasi	25.200.000	2.685.000	17.640.000	9 Lokasi	55.450.100	9 Lokasi	100.975.100	100,0	99,9
Penyediaan angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan	52,32%	201.262.700	48%	54.500.000	38.500.000	68.911.500	68,90%	39.249.200	68,9%	201.262.700	68,9%	100,0
Jumlah kendaraan uji TKR	2450 Unit		102 Unit		774		1689 Unit		1689 Unit		68,9	
Jumlah busi lulus uji yang teracda	2100 Set Smart Card	101.593.600	2.100	44.000.000	28.000.000	29.593.600	2100 Set Smart Card	0	2100 Set Smart Card	101.593.600	100,0	100,0
Penyediaan sarana dan prasarana Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Bermotor	1 Paket	99.899.100	0	10.600.000	10.500.000	39.327.900	1 Paket	39.249.200	1 Paket	99.877.100	100,0	100,0
Pelaksanaan Manajemen dan Baktirasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota	71,43%	244.177.300	33%	58.574.700	2.685.900	58.574.700	126%	124.342.300	126%	244.177.300	126%	100,0
Jumlah pengujian dan pengendalian lalu lintas	600 Laporan		191 Laporan		163		762 Laporan		762 Laporan		126%	1,00
Jumlah titik lokasi rawan kecelakaan dan kejadian	30 Lokasi	244.177.300	30 Lokasi	58.574.700	2.685.900	58.574.700	30 Lokasi	124.342.300	30 Lokasi	244.177.300	100,0	100,0
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	300 Unit	118.928.000	17%	10.928.400	335.200	10.928.400	110%	98.883.000	110%	118.928.000	99%	100,0

Pelembagaan, Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan dan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kondaraan Bermotor zain	Jumlah angketan umum yang terdistrib	118.854.849	98.685.000	298	118.854.849	99%	99,9
Penyelenggaraan Angketan Orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/kota/kabupaten/kota	50 Dokumen	33.224.300	0	422%	33.224.300	422%	100,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Zin Penyelenggaraan Angketan Orang dalam Trayek Kawasan Kabupaten/kota	Jumlah kartu kontrol pengawasan trayek yang terdistrib	33.224.300	0	211	33.224.300	422,55%	100,0
Jumlah		4.588.903.293	0		4.588.903.293		98,0
Rata-rata Persen Capaian (S) sub kegiatan Pradiklat Kinerja							

Catatan Faktor Produksi Keterhasilan dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja sesuai dengan Triwulan IV Tahun 2022
 Faktor penghambat (rendah) keterhasilan kinerja :

Ditetapkan
 Tanggal : 04 Januari 2023
 Kepala Dinas Perhubungan
Dr. H. Akhsan Amrullah, MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 197406031993021001

